

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
OBJEK WISATA TAPAK TUAN TAPA
DI KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

INDAH RIZKI AMALIA

NIM. 180802040

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Indah Rizki Amalia
NIM : 180802040
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Tapaktuan, 29 Juli 2000
Alamat : Lhok Bengkuang, Tapaktuan, Aceh Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Juni 2023

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

10000
METRIK
TEMPEL
332AAKX431969314
INDAH RIZKI AMALIA

NIM. 180802040

PENGESAHAN PEMBIMBING

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
OBJEK WISATA TAPAK TUAN TAPA DI
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

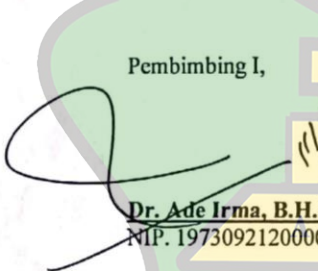
INDAH RIZKI AMALIA
NIM. 180802040

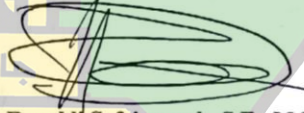
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.
NIP. 197309212000032004


Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc.
NIDN. 2007017903

PENGESAHAN SIDANG

**EVALUASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
OBJEK WISATA TAPAK TUAN TAPA DI
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Jumat, 21 Juli 2023 M
03 Muharram 1445 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A.
NIP. 197309212000032004

Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc.
NIDN. 2007017903

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Sayed Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 198611122015031005

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, M.Ag.
NIP. 197403271999031009

ABSTRACT

Objek wisata merupakan suatu aktivitas yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk dapat datang kesuatu tempat/daerah tertentu. Untuk mengembangkan suatu objek wisata yang memiliki potensi dari segi geografis seperti pemandangan alam, peninggalan sejarah dan seni budaya. Pengembangan pariwisata dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, pariwisata dianggap sebagai suatu aset yang strategi untuk mendorong pembangunan pada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki potensi objek wisata. Capaian kebijakan atau program yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan pada pengembangan objek wisata Tapak Tuan Tapa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya upaya pengembangan objek wisata Tapak Tuan Tapa oleh pemerintah kabupaten Aceh Selatan telah dilakukan pengembangan, hal ini dapat dilakukan melalui adanya proses (*input*), hasil (*output*), dan dampak (*impact*). Meskipun demikian, pengembangan objek wisata belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih ada beberapa infrastruktur sarana dan prasarana yang belum diperbaiki dan keterbatasan anggaran. Kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan pengembangan objek wisata sebahagian sudah dilaksanakan program atau kegiatan dengan baik, namun belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan masih adanya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah.

Kata Kunci: *Evaluasi Kebijakan, Pengembangan, Objek wisata*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya serta petunjuk kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Evaluasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa Di Kabupaten Aceh Selatan”. Shalawat dan salam peneliti persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat Islam. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat pada program Strata-1 di prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada awalnya peneliti mengalami berbagai kesulitan, namun berkat doa, usaha maksimal dari peneliti, doa dan dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan peneliti. Oleh karena itu, skripsi ini peneliti persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terhebat serta teristimewa dalam hidup peneliti yakni Ibu dan Bapak tercinta dan dengan hati yang tulus peneliti mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara serta penasehat akademik yang selalu memberikan dorongan dan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A. selaku pembimbing I yang telah membimbing memberikan saran serta mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Renaldi Safriansyah, S.E., M.HSc. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan arahan dan masukan serta waktu bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Kepada Orangtua dan sekeluarga besar yang telah memberikan dukungan dan nasehat serta do'a yang tiada henti-hentinya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Rizki Fitah Azha, S.E., Silmi Khaira, S.AP., Nurul Annisa, Reski Dewi Ayu A, S.Pd., Maghfirah, Fatimah Zahara, Novita Sari, Siti Amalia Kamila, S.AP., Fadhilah, S.AP., Siti Nurbadriah, S.AP., Naisyawa Bidari Juana, Rifka Hidayah, S.AP., Mekar Roslia, S.H., Ivana Lara Angelia, S.H., Nia Salsabila, A.Md., selaku sahabat-sahabat terbaik peneliti yang bisa mengerti dan menerima peneliti dalam keadaan suka maupun duka serta turut memberikan bantuan dan semangat motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Teman-teman mahasiswa Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 2018.

Terima kasih atas dukungan, perhatian dan semangat yang kalian berikan selama ini, yang selalu ada untuk memberikan bantuan dan semangat serta motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT memberikan sebaik-baik balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 01 November 2022

Peneliti,

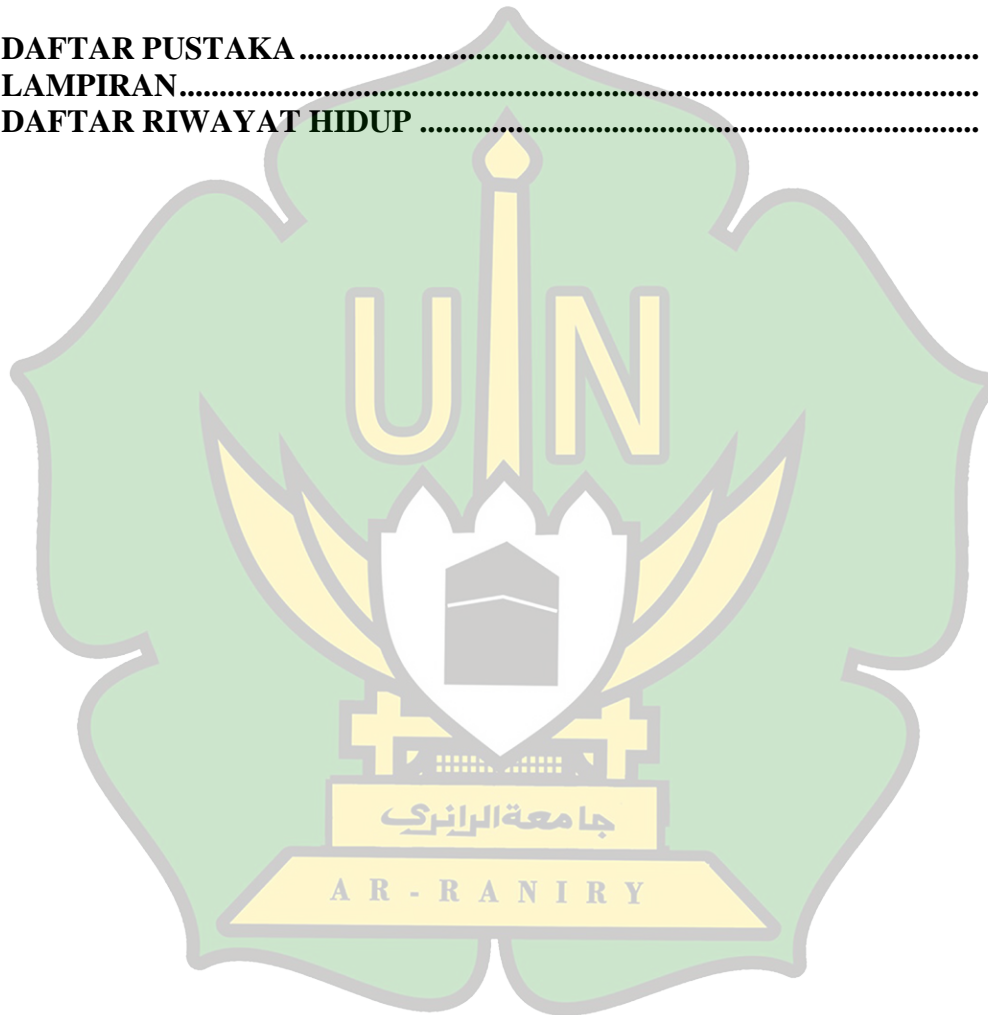
Indah Rizki Amalia



DAFTAR ISI

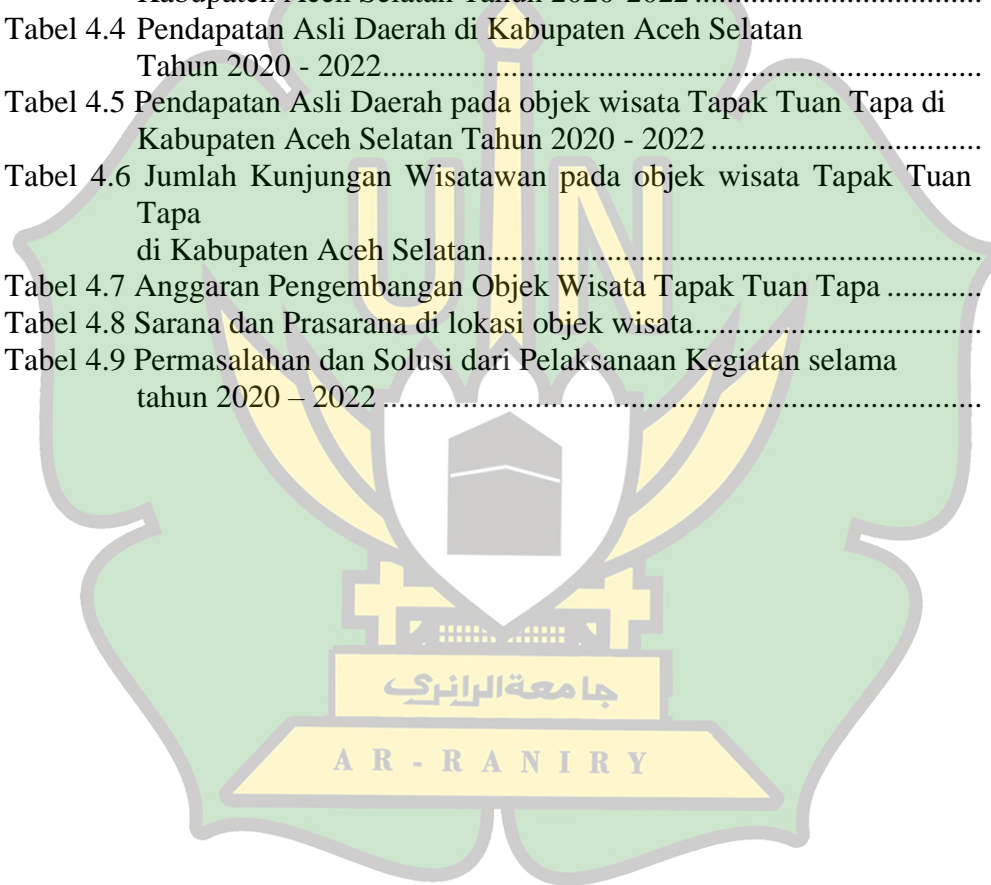
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB IPENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Rumusan Masalah	6
1.4. Tujuan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	7
1.6. Penjelasan Istilah.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Tinjauan Pustaka	13
2.2.1 Teori Evaluasi Kebijakan.....	13
2.2.2 Konsep Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	17
2.2.3 Konsep Pengembangan Pariwisata	19
2.2.4 Dasar Hukum Pengembangan Pariwisata	20
2.3. Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1. Pendekatan Penelitian	24
3.2. Fokus Penelitian	24
3.3. Lokasi Penelitian	26
3.4. Jenis Dan Sumber Data	26
3.5. Informan Penelitian	27
3.6. Teknik Pengumpulan Data	30
3.7. Teknik Analisa Data.....	32
3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1. Hasil Penelitian	34
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Selatan	34
4.1.2. Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan	45
4.2. Pembahasan.....	48

4.2.1. Pengembangan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa Di Kabupaten Aceh Selatan.....	48
4.2.2. Tantangan Dalam Pengembangan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa Periode 2020-2022.....	69
BAB V PENUTUP.....	78
5.1. Kesimpulan.....	78
5.2. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	105



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	9
Tabel 3.1 Dimensi dan Indikator Kebijakan Pengembangan Objek Wisata....	25
Tabel 3.2 Dimensi dan Indikator Tantangan/Hambatan yang dihadapi oleh pemerintah	26
Tabel 3.3 Informan Penelitian.....	28
Tabel 4.1 Pembagian Luas Wilayah/Daerah.....	36
Tabel 4.2 Daftar Objek Wisata Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022.....	37
Tabel 4.3 Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020-2022	55
Tabel 4.4 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 - 2022.....	63
Tabel 4.5 Pendapatan Asli Daerah pada objek wisata Tapak Tuan Tapa di Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 - 2022	64
Tabel 4.6 Jumlah Kunjungan Wisatawan pada objek wisata Tapak Tuan Tapa di Kabupaten Aceh Selatan.....	66
Tabel 4.7 Anggaran Pengembangan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa	71
Tabel 4.8 Sarana dan Prasarana di lokasi objek wisata.....	73
Tabel 4.9 Permasalahan dan Solusi dari Pelaksanaan Kegiatan selama tahun 2020 – 2022	76



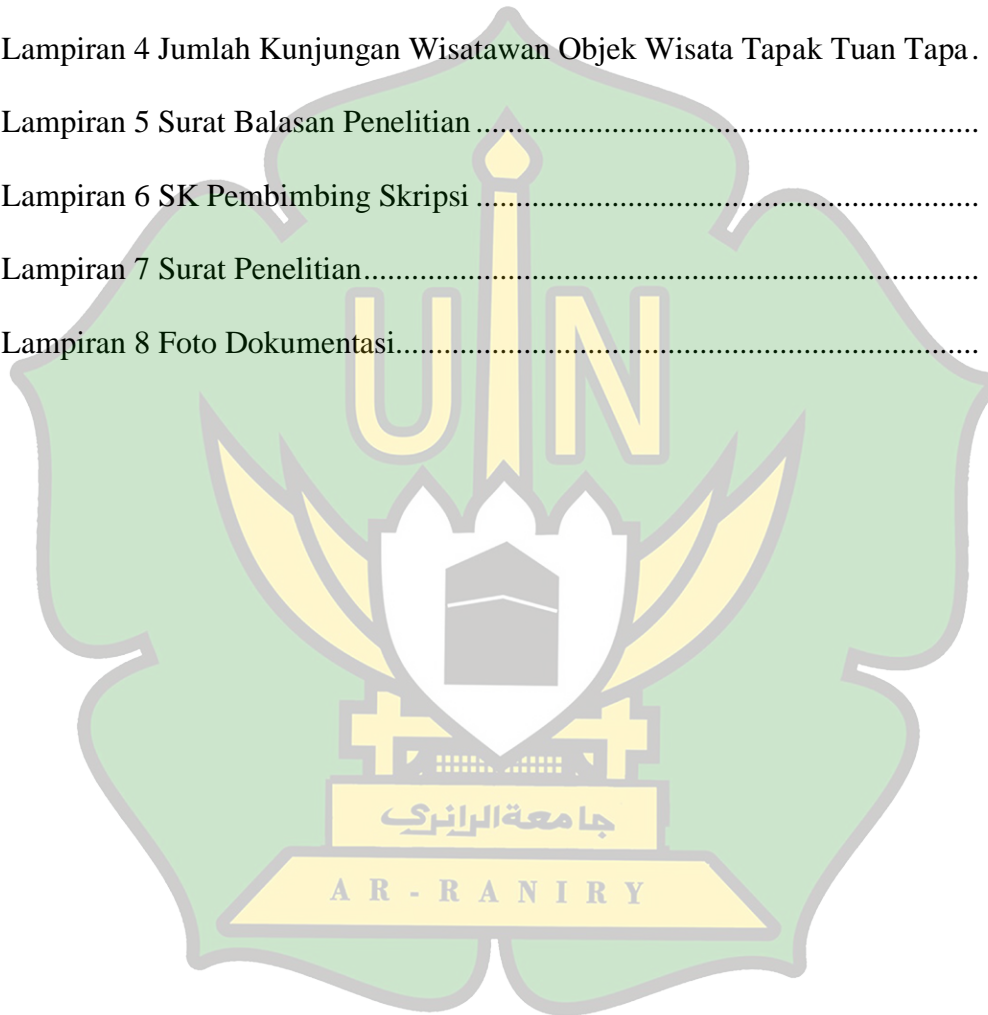
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	21
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Aceh Selatan.....	35
Gambar 4.2 Kondisi Bangunan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan	44
Gambar 4.3 Brosur Destinasi Wisata Kabupaten Aceh Selatan	59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Pedoman Wawancara Penelitian	84
Lampiran 2 Daftar Objek Wisata Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022	86
Lampiran 3 Sarana dan Prasarana di lokasi objek wisata	93
Lampiran 4 Jumlah Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa.	93
Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian	94
Lampiran 6 SK Pembimbing Skripsi	95
Lampiran 7 Surat Penelitian.....	96
Lampiran 8 Foto Dokumentasi.....	97



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pengelolaan sektor kepariwisataan merupakan salah satu urusan pemerintah dalam rangka pembangunan daerah, maka pemerintah dengan segala upaya berusaha untuk menggali potensi tersebut menjadi sumber daya bagi kepariwisataan. Indonesia adalah sebuah negara berkembang yang memiliki sumber daya alam yang sangat berpotensi dengan keanekaragaman suku, agama, adat istiadat, ras, dan budaya. Ayu Karlina menyebutkan bahwa “Keberagaman yang dimiliki tersebut menjadi keuntungan dalam maju dan berkembangnya pemerintahan Indonesia. Sumber daya alam adalah aset utama yang harus dikelola dengan sedemikian rupa karena kekayaan dan keindahan yang dimiliki Indonesia, kini dapat menjadi salah satu sektor yang dapat menyumbang pendapatan bagi negara dan daerah.”¹

Secara historis Kabupaten Aceh Selatan khususnya di Kota Tapaktuan memiliki sejumlah objek wisata yang dikunjungi oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat luar daerah. Adapun studi ini berfokus pada objek wisata Tapak Tuan Tapa. Objek wisata tersebut yaitu wisata Tapak Tuan Tapa, dimana legenda dan jejak tapak kaki yang menjadi daya tarik pengunjung yang membuat keingintahuan para pendatang ataupun wisatawan ramai berdatangan. Penamaan Tapaktuan ini sendiri tidak terlepas dari legenda Tuan Tapa dan juga keberadaan

¹Ayu Karlina, Skripsi: “*Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam Di Kabupaten Aceh Jaya*” (Banda Aceh: UINAR, 2019). Hal. 1

tapak kaki raksasa tersebut, dimana legenda ini sudah menjadi cerita rakyat sejak turun-temurun dan dipercayai hingga saat ini.

Kunjungan wisata ke objek Tapak Tuan Tapa telah mengembangkan pendapatan bagi pemerintah daerah yaitu dalam bentuk pemberian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor pariwisata. Selain itu juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Selain mampu melestarikan alam, memajukan kebudayaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kepariwisataan juga bertujuan untuk menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990. Pengembangan objek wisata tidak terlepas dari peranan pemerintah khususnya Dinas Pariwisata yang mana peran tersebut sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Penerapan semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Di dalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata ke dalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik dan sosial dari suatu negara.²

²Rotua Kristin Simamora, dkk, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara", (Medan: Universitas Medan Area, 2016), Vol. 4 No 1, Hal 81

Untuk meningkatkan taraf perekonomian daerah, pemerintah melakukan pengembangan sektor-sektor perekonomian, salah satunya adalah pengembangan sektor kepariwisataan. Pengembangan sektor pariwisata akan berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan perekonomian masyarakat. Sektor pariwisata berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara dan daerah.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang harus dimanfaatkan untuk pembangunan kepariwisataan sebagai bagian dari pembangunan daerah. Pembangunan kepariwisataan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.³

Sebagai salah satu sektor pengembangan pariwisata yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, pariwisata dianggap sebagai suatu aset yang strategi untuk mendorong pembangunan pada wilayah-wilayah tertentu yang mempunyai potensi objek wisata.⁴ Pengembangan pariwisata sangat potensial jika didukung oleh keindahan alam dan kebudayaan. Sumber daya alam adalah aset utama yang harus dikelola dengan sedemikian rupa karena kekayaan dan keindahan yang dimiliki.⁵

Pengembangan pariwisata sangat bergantung pada peran dan kebijakan pemerintah dalam konteks desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki wewenang

³Anggita Permata Yakup, Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, (Surabaya: Universitas Airlangga, 2019), Hlm. 1

⁴Ibid, Hlm. 2

⁵Ayu Karlina, Skripsi: Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam Di Kabupaten Aceh Jaya (Banda Aceh: UINAR, 2019). Hlm. 1

untuk membangun dan mengembangkan potensi daerah masing-masing termasuk potensi di sektor sektor kepariwisataan. Dengan otonomi daerah, pemerintah lokal dapat melahirkan inovasi kebijakan, strategi dan implementasi dalam rangka pembangunan pariwisata lokal.⁶ Pengembangan objek wisata tidak terlepas dari peranan pemerintah khususnya Dinas Pariwisata yang mana peran tersebut sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kepariwisataan, diperlukan langkah-langkah pengaturan yang semakin mampu mewujudkan keterpaduan dalam kegiatan penyelenggaraan kepariwisataan, serta memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan ekonomi daerah serta objek dan daya tarik wisata.⁷

Kabupaten Aceh Selatan menjadi salah satu daerah yang berada pesisir selatan provinsi Aceh yang sangat dikenal memiliki destinasi wisata yang menarik. Kabupaten Aceh Selatan dilihat dari potensi alamnya, sektor pariwisata sangat potensial untuk dikembangkan, karena didukung oleh letak geografisnya, serta kultur masyarakat lokalnya yang kental dan ramah.

Berdasarkan observasi peneliti menemukan bahwa para pengunjung mengeluhkan minimnya kondisi jalan menuju lokasi wisata Tapak Tuan Tapa. Hal ini diakibatkan jembatan penyeberangan yang biasa digunakan para wisatawan untuk berjalan melihat jejak telapak raksasa itu sudah rusak dan beresiko ambruk

⁶Renaldi Safriansyah, Sub-National Innovation Policy: A Universal Entitlement To Education Grant In Sabang, Indonesia, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021), Vol. 7 No. 1, Hlm. 29-30

⁷Jhonni Sun, Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kepariwisataan Festival Tahunan Cap Go Meh Sebagai Upaya Pariwisata Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Jo, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Di Kota Singkawang, (Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2016), Hlm. 3

karena bangunan yang sudah tidak layak. Permasalahan ini juga berhubungan dengan tingkat jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata Tapak Tuan Tapa. Minimnya sarana dan prasarana pendukung di kawasan objek wisata Tapak Tuan Tapa telah menyebabkan penurunan minat wisatawan untuk berkunjung ke lokasi objek wisata tersebut. Berdasarkan pada data BPS Kabupaten Aceh Selatan yang bahwasanya tingkat jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata tersebut pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 29.782 wisatawan. Namun pada tahun 2021 yang lalu, tingkat jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata Tapak Tuan Tapa mengalami penurunan sebanyak 29.282 wisatawan yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Pada tahun 2022 tingkat kunjungan wisatawan pada objek wisata Tapak Tuan Tapa semakin menurun menjadi 24.393 wisatawan, oleh karena itu perlu dilakukan kajian untuk mengetahui penyebab penurunan tingkat kunjungan wisatawan dan mengevaluasi sejauh mana upaya pengembangan objek wisata Tapak Tuan Tapa.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, secara singkat dapat dikatakan bahwa pengembangan pada objek wisata Tapak Tuan Tapa menjadi salah satu hal yang harus diatasi oleh pemerintah. Hal tersebut juga sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 bahwasanya “Pemerintah berwenang memelihara, mengembangkan, melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali, memberikan kemudahan yang mendukung kunjungan wisatawan serta mengawasi, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi

⁸BPS Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka 2022

berbagai dampak negatif bagi masyarakat.”⁹ Untuk itu, peneliti ingin membahas hal mengenai **“Evaluasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa Di Kabupaten Aceh Selatan”**.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Keterbatasan sarana prasarana (seperti jembatan layang menuju objek wisata) telah menyebabkan tingkat kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata Tapak Tuan Tapa relatif rendah.
2. Perlu adanya evaluasi untuk menilai sejauh mana upaya pengembangan objek wisata Tapak Tuan Tapa yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten Aceh Selatan.

1.3. Rumusan Masalah

1. Sejauh mana upaya pengembangan objek wisata Tapak Tuan Tapa di Kabupaten Aceh Selatan selama tahun 2020-2022?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dalam pengembangan objek wisata Tapak Tuan Tapa?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengembangan objek wisata Tapak Tuan Tapa di Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk menganalisis tantangan yang dihadapi oleh pemerintah terkait pengembangan objek wisata Tapak Tuan Tapa di Kabupaten Aceh Selatan.

⁹Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, Hlm. 15

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang di hasilkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Memberikan pengetahuan kepada publik tentang kebijakan pengembangan sektor kepariwisataan oleh pemerintah daerah.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang sejauh mana pengembangan objek wisata Tapak Tuan Tapa di Kabupaten Aceh Selatan.

2. Bagi pemerintah

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi acuan bagi stakeholder/pemerintah agar dapat mengelola, mengevaluasi dan mengembangkan objek wisata yang ada di kabupaten Aceh Selatan.

1.6. Penjelasan Istilah

Adapun di dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa istilah yaitu:

1. Evaluasi kebijakan, merupakan kegiatan pemberian nilai atas suatu “fenomena” yang di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgment*) tertentu.¹⁰
2. Pengembangan pariwisata, merupakan suatu usaha secara berencana dan terstruktur untuk membenahi objek dan kawasan yang ada dan membangun objek dan kawasan wisata yang baru yang akan dipasarkan pada calon wisatawan.¹¹

¹⁰Hayat, Buku Kebijakan Publik, (Malang: Universitas Islam Malang, 2019), Hlm. 35

¹¹Moh Agus Sutiarmo, Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Ekowisata, (Bali: STPBI, 2017), Hlm. 2

3. Potensi wisata, adalah suatu tempat yang memiliki daya tarik bagi wisatawan, misalnya pemandangan alam, peninggalan sejarah, dan seni budaya.¹²
4. Kepariwisata, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 4, Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.¹³
5. Pariwisata, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dalam pasal 1 ayat 3, Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁴
6. Objek wisata, Menurut Marpaung, Objek wisata adalah suatu bentukan atau aktivitas yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan atau pengunjung untuk dapat datang kesuatu tempat/daerah tertentu.¹⁵
7. Rekreasi, Menurut Nash, Rekreasi dari bahasa latin, *re-creare* yang secara harfiah berarti 'membuat ulang' adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang.¹⁶ Sedangkan menurut Kemenpar RI, Rekreasi adalah suatu perjalanan orang-orang mengunjungi tempat tertentu dalam waktu sementara yang didalamnya terdapat daya tarik wisata olahraga, baik alam, budaya maupun buatan, bertujuan untuk ikut berpartisipasi baik secara aktif maupun pasif guna memenuhi kesenangan/kepuasan.¹⁷

¹²Atik Kadarwati, Potensi dan Pengembangan Obyek Wisata Kota Lama Semarang Sebagai Daya Tarik Wisata Di Semarang, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008), Hlm. 20

¹³Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, Tentang Kepariwisata, Hlm. 3

¹⁴Ibid, Hlm. 3

¹⁵Putro Prasetyo, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Pengembangan Potensi Objek Wisata Kota Tarakan, (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2013), Vol. 1, No. 1, Hlm. 156

¹⁶Apriyan Dinata, dkk, Preferensi Tempat Bersantai Dan Rekreasi Bagi Masyarakat Kota Pekanbaru, Indonesia, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2016), Hlm. 50

¹⁷<http://eprints.polsri.ac.id/4972/3/BAB%20II.pdf>

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah suatu kajian penelitian yang mana sudah dilakukan atau dikaji oleh peneliti sebelumnya serta relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat diambil dari berbagai sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian, dan lain sebagainya. Tujuan dari penelitian terdahulu berguna sebagai bahan acuan dan perbandingan agar dapat menghindari terjadinya persamaan dengan penelitian ini. Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ian Asriandy, 2016, Strategi Pengembangan Obyek Wisata Air Terjun Bissapu Di Kabupaten Bantaeng	Kualitatif Deskriptif	Strategi pengembangan yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng adalah strategi sebagai rencana. Adapun beberapa implementasi strategi pengembangan yang teridentifikasi yang dilakukan yakni, Pengembangan yang dilakukan harus terfokus pada satu titik; Keterlibatan semua elemen-elemen yang terkait; Mengidentifikasi secara menyeluruh terhadap obyek yang akan dikembangkan; Melakukan pelatihan-pelatihan baik pemandu wisata, dan pengelola wisata; Koordinasi yang terus dilakukan kepada pemerintah dan warga

			sekitar kawasan obyek wisata.
2.	Amin Sapto Saputro, dkk, 2017, Evaluasi Pengembangan Obyek Wisata Di Kabupaten Banyumas Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014.	Kualitatif Deskriptif	Upaya pengembangan yang dilakukan oleh DINPORABUDPAR Kabupaten Banyumas khususnya di Lokawisata Baiturraden untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata masih terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Kurangnya keterlibatan pegawai yang berada di lapangan dalam proses pengembangan obyek wisata menjadikan hasil yang dirasakan kurang sesuai dengan keinginan dari pemberi masukan. Kemudian yang harus menjadikan perhatian bagi dinas terkait adalah kurangnya pelatihan bagi pegawai, terutama pegawai yang berada di lapangan.
3.	Irene Tivani, 2016, Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tana Toraja	Kualitatif Deskriptif	Pelaksanaan program pengembangan pariwisata oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berjalan sesuai dengan sistem yang ada, namun terdapat masalah-masalah yang membawa dampak negatif sehingga pada pelaksanaannya masih belum optimal dalam mengembangkan pariwisata Tana Toraja, khususnya pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana. Faktor yang mempengaruhi perkembangan pariwisata adalah faktor pendukung yaitu objek wisata yang sudah terkenal, partisipasi masyarakat dan koordinasi yang baik dengan pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat yaitu keterbatasan dana, lokasi geografis objek wisata serta minimnya dan tidak terpusatnya informasi.
4.	Wazni, dkk,	Kualitatif	Kebijakan pengembangan pariwisata tidak dapat

	2020, Evaluasi Input Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Siak	Deskriptif	dilepaskan dari dukungan input kebijakan berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana, rencana strategis pengembangan pariwisata serta dukungan anggaran. Di Kabupaten Siak, sumber daya manusia yang bekerja pada Dinas Pariwisata masih terbatas secara kualitas dan kuantitas. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak juga dihadapkan pada situasi belum optimalnya pemanfaatan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai salah satu sarana pemasaran dan promosi pariwisata. Sedangkan dari segi regulasi, Kabupaten Siak memiliki keunggulan regulasi melalui visi daerah yang berorientasi pada kebudayaan dan pariwisata, tersedianya <i>roadmap</i> kebudayaan melayu dan PERDA yang mengatur tentang bahasa dan pakaian melayu. Sedangkan dari aspek pendanaan, penyerapan anggaran pada Dinas Pariwisata masih belum maksimal disebabkan oleh keterbatasan sumber daya aparatur yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan.
5.	Odiakta Iqtyar, dkk, 2020, Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Tentang Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang.	Kualitatif Deskriptif	Badan Promosi (BP2KS) berperan penting dalam pemasaran dan pengembangan pariwisata, organisasi itu sendiri masih belum optimal. BP2KS sebagai lembaga independen masih memiliki banyak kekurangan seperti kejelasan tentang peran organisasi, dan pemenuhan tugas organisasi dan fungsi yang masih belum optimal.

6.	Syamsiar, dkk, 2020, Evaluasi Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Wajo.	Kualitatif Deskriptif	Evaluasi kebijakan dapat berjalan baik karena di dukung oleh lima unsur pengembangan industri pariwisata yaitu penguatan struktur fungsi, hierarki dan hubungan industri pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, pengembangan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis pariwisata, dan pengembangan industri pariwisata yang bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian kebijakan pengembangan industri pariwisata di dukung oleh letak geografis yang strategis dan sumber daya yang dimiliki. Meskipun lamban dalam pengembangannya karena pengetahuan di bidang kepariwisataan yang dimiliki oleh para pelaku industri pariwisata maupun aparatur masih kurang. Namun pemerintah daerah telah mengupayakan pendidikan dan pelatihan di bidang kepariwisataan dalam beberapa tahun terakhir bagi sektor terkait.
----	---	-----------------------	--

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu dapat menjadi bahan acuan yang berkaitan dengan penelitian saat ini dan adapun beberapa perbedaan dan persamaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Persamaannya yaitu seperti bagaimana evaluasi kebijakan pengembangan pada objek wisata yang dilakukan pemerintah daerah/kabupaten untuk menjaga, mengembangkan, melestarikan dan mengawasi pada objek wisata dan berbagai tantangan yang dihadapi. Jika berbicara perbedaan

tentunya masing-masing daerah serta pemerintah yang bertugas dalam mengembangkan kepariwisataan tentunya berbeda.

2.2. Tinjauan Pustaka

2.2.1 Teori Evaluasi Kebijakan

Menurut Situmorang, evaluasi kebijakan dilakukan guna menemukan penyebab dari kegagalan kebijakan dan apakah kebijakan tersebut berakhir pada dampak yang dicita-citakan. Jika evaluasi dikatakan kegiatan fungsional yang tidak hanya dilakukan diakhir, tetapi juga pada setiap tahapan kebijakan.¹⁸

Untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik sebagai pertanggungjawaban pada pengembangan destinasi wisata serta sejauh mana upaya pengembangan objek wisata yang telah dilaksanakan dan melihat sejauh mana upaya pemerintah terhadap pengembangan pariwisata, maka diperlukan evaluasi. Menurut Anderson dalam Winarno, “Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut.”¹⁹

Menurut Lester dan Stewart dalam Winarno, “Evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua

¹⁸Iman Amanda Permatasari, Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan), (Yogyakarta: CV. The Journal Publishing, 2020), Vol. 1, No. 1, Hlm. 36

¹⁹Niswa Ahmad Ridha, dkk, Evaluasi Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata di Kabupaten Wajo, (Sulawesi Selatan: Universitas Puangrimaggalatung, 2020), Vol. 1, No. 1, Hlm. 39

adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (*Outcome*) atau dampak (*Impact*) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang²⁰.

Tipe-tipe evaluasi kebijakan menurut James Anderson seperti yang dikutip oleh Situmorang, terdiri dari tiga tipe yaitu:

1. Evaluasi merupakan kegiatan fungsional sehingga dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan.
2. Evaluasi berfokus pada kinerja sebuah kebijakan, sehingga memilih kejujuran dan efisiensi dalam pelaksanaannya
3. Evaluasi kebijakan sistematis yang mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan seputar kesesuaian kebijakan dengan tujuan awal, biaya-biaya yang digunakan dan keuntungan yang diraih, dan penerima keuntungan²¹.

Tujuan pelaksanaan evaluasi adalah untuk memberikan pemahaman tentang tujuan dari sebuah kebijakan, bagaimana pelaksanaannya, dan dampak seperti apa yang didapatkan. Terdapat tiga unsur yang harus dilakukan evaluator dalam pelaksanaan evaluasi, yaitu:

²⁰Ibid, Hlm. 39

²¹Iman Amanda Permatasari, Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan), (Yogyakarta: CV. The Journal Publishing, 2020), Vol. 1, No. 1, Hlm. 36

1. Menjelaskan output kebijakan yang merupakan hasil dari kebijakan tersebut.
2. Evaluasi berkaitan dengan kemampuan sebuah kebijakan dalam memperbaiki masalah sosial.
3. Evaluasi berkaitan dengan setiap konsekuensi kebijakan dalam bentuk reaksi akan tindakan pemerintah.

Sementara itu, dampak dari sebuah kebijakan memiliki empat dimensi, yaitu:

1. Dampak pada masalah publik dan pada orang-orang yang terkait di dalamnya
2. Dampak pada keadaan kelompok lain di luar sasaran sebuah kebijakan
3. Dampak terhadap keadaan saat ini dan juga masa depan
4. Biaya yang secara tidak langsung ditanggung masyarakat

Proses evaluasi kebijakan memiliki masalah-masalah karena proses ini mengikutsertakan banyak kepentingan, sehingga kegagalan ketika menentukan kriteria dapat menghambat proses ini. Menurut Anderson, masalah-masalah evaluasi kebijakan terdiri dari:

1. Adanya ketidakpastian akan tujuan kebijakan. Ketidakpastian atau ketidakjelasan ini berasal dari proses penetapan kebijakan
2. Kausalitas
3. Penyebaran dampak dari kebijakan, dimana dampak tersebut merupakan bagian dari keadaan-keadaan kelompok di luar kelompok sasaran utama

4. Sulitnya mendapatkan data terutama statistik dan informasi yang relevan dalam pelaksanaan evaluasi
5. Resistensi pejabat, di mana evaluator harus berpikir objektif dalam mendapatkan pengetahuan
6. Evaluasi dapat mengurangi dampak, sehingga tidak menerima banyak perhatian atau dengan kata lain diabaikan.

Di sisi lain terdapat delapan faktor penyebab kebijakan tidak mendapatkan dampak yang diharapkan. Ke delapan faktor tersebut menurut Anderson antara lain:

1. Sumber yang tidak mencukupi
2. Metode pelaksanaan kebijakan
3. Masalah publik sebagai akibat dari berbagai faktor, sementara kebijakan yang tengah dilaksanakan hanya berfokus pada satu permasalahan
4. Cara masyarakat memberi respon dan membiasakan diri dengan kebijakan publik
5. Tujuan kebijakan saling bertentangan dengan yang lainnya
6. Biaya yang besar
7. Ketidakmungkinan penyelesaian dari banyak masalah publik
8. Bersangkutan dengan sifat masalah yang akan diselesaikan oleh tindakan kebijakan.²²

²²Iman Amanda Permatasari, Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan), (Yogyakarta: CV. The Journal Publishing, 2020), Vol. 1, No. 1, Hlm. 37

2.2.2 Konsep Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Menurut Michael P. Todaro definisi pembangunan sebagai “Proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam struktur sosial, sikap-sikap rakyat, dan lembaga-lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*), dan pemberantasan kemiskinan absolut”. Pembangunan itu pada hakikatnya haruslah menyuarakan seluruh nada dasar (*gamet*) perubahan yang dengan itu pula seluruh sistem sosial seirama atau senada dengan berbagai dasar kebutuhan dan keinginan masing-masing individual dan kelompok masyarakat yang bernaung di dalam sistem itu, bergerak maju dari kondisi kehidupan yang serba kekurangan dan tidak memuaskan, menuju kepada kondisi kehidupan yang jauh lebih baik, baik material maupun spiritual.

Menurut S.P. Siagian memberikan definisi pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).”²³

Menurut Hidayat dalam Erry Pratama menyebutkan bahwa pariwisata berorientasi “*Sustainable Tourism* (pariwisata berkelanjutan) dan *Sustainable Development* (pembangunan berkelanjutan) adalah istilah yang mengakibatkan bermacam-macam tanggapan/respons dari manajer-manajer, perencana-perencana pariwisata serta pembela/advokat lingkungan, baik

²³Ramli AT, dkk, Konsep dan Teori Pembangunan, <http://repository.ut.ac.id/4281/1/IPEM4542-M1.pdf>

skeptis sampai yang memperhatikan.”²⁴ Pariwisata berkelanjutan didefinisikan oleh UN-WTO sebagai pariwisata yang menghitung secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan sekarang dan yang akan datang, menjawab kebutuhan pengunjung, industri (pariwisata), lingkungan dan komunitas tuan rumah.

Berdasarkan teori diatas bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu pengembangan pariwisata yang dalam upaya perencanaannya memperhatikan segala kemungkinan yang terjadi, seperti dampak yang akan ditimbulkan, hambatan yang akan muncul, serta cara mengatasi dan mencegah kemungkinan tersebut.²⁵

Menurut Noor dan Pratiwi, konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan diklarifikasikan atas lima kategori, yaitu:

1. Melakukan usaha-usaha yang dapat menjamin kelestarian sosial-budaya dan lingkungan hidup yang ada serta melindungi dari hal-hal yang dapat mengancam keberadaannya;
2. Memberikan pendidikan dan pelatihan tentang kepariwisataan kepada masyarakat lokal dan mengikutsertakan mereka dalam proses perencanaan, pengembangan, pelestarian, serta penilaian terhadap pengembangan pariwisata;
3. Menggunakan konsep daya tampung (*carrying capacity*), yaitu membatasi kunjungan wisatawan sesuai dengan kapasitas yang dapat ditampung oleh atraksi wisata tersebut sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal;
4. Memberikan informasi dan pendidikan kepada wisatawan dan juga masyarakat lokal mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan warisan budaya;
5. Melakukan penelitian secara berkala untuk mengetahui perkembangan dan penyimpangan yang terjadi sehubungan dengan penerapan dari konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan.²⁶

²⁴Erry Pratama, dkk, *Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Indonesia*, (Surabaya: UPN Veteran Jawa Timur, 2019), Vol. 2, No. 1, Hlm. 77

²⁵Ibid, Hlm. 77

²⁶Ibid, Hlm. 78

2.2.3 Konsep Pengembangan Pariwisata

Pengembangan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan keahlian, kemampuan, nilai, moral serta cara tertentu sesuai dengan apa yang dikehendaki. Pengembangan juga dapat diartikan sebagai satu bagian manajemen yang menitik beratkan pada implementasi potensi budaya harus dilaksanakan dengan rentang waktu, berapa langkah sistematis yang dapat mengarah pada pencapaian hasil yang diharapkan pada perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan visi dari sasaran rencana tersebut. Menurut Lanya, pengertian pengembangan adalah memajukan dan memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang telah ada.²⁷

Pengembangan pariwisata merupakan suatu usaha secara berencana dan terstruktur untuk membenahi objek dan kawasan yang ada dan membangun objek dan kawasan wisata yang baru yang akan dipasarkan pada calon wisatawan.²⁸ Pengembangan pariwisata pada umumnya bertujuan untuk memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, dalam pembangunan objek wisata dan daya tarik dilakukan dengan memperhatikan kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup serta kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri.

Kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengembangan pariwisata sekitar kawasan wisata yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan cara:

²⁷Ayu Karlina, Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam Di Kabupaten Aceh Jaya, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), Hlm. 14

²⁸Moh Agus Sutiarmo, Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Ekowisata, (Bali: STPBI, 2017), Hlm. 2

- a. Menyusun strategi pengembangan, yaitu menghubungkan objek wisata yang ada dan mengembangkan aktivitas wisata atau objek baru untuk memperkaya khasanah objek wisata, mengenali tradisi dan kesenian daerah setempat.
- b. Membuat konsep dasar rencana pengembangan kawasan wisata yang didasarkan pada pendekatan perilaku, lingkungan serta budaya manusia.
- c. Membuat rencana penggunaan tanah/lahan di sekitar kawasan wisata seperti kawasan untuk pengembangan objek wisata budaya dan alam.²⁹

Peran pemerintah perlu dioptimalkan dalam mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha jasa pariwisata yang ada dengan menitikberatkan pada upaya menjaga kelestarian fungsi lingkungan dan objek wisata tersebut.

2.2.4 Dasar Hukum Pengembangan Pariwisata

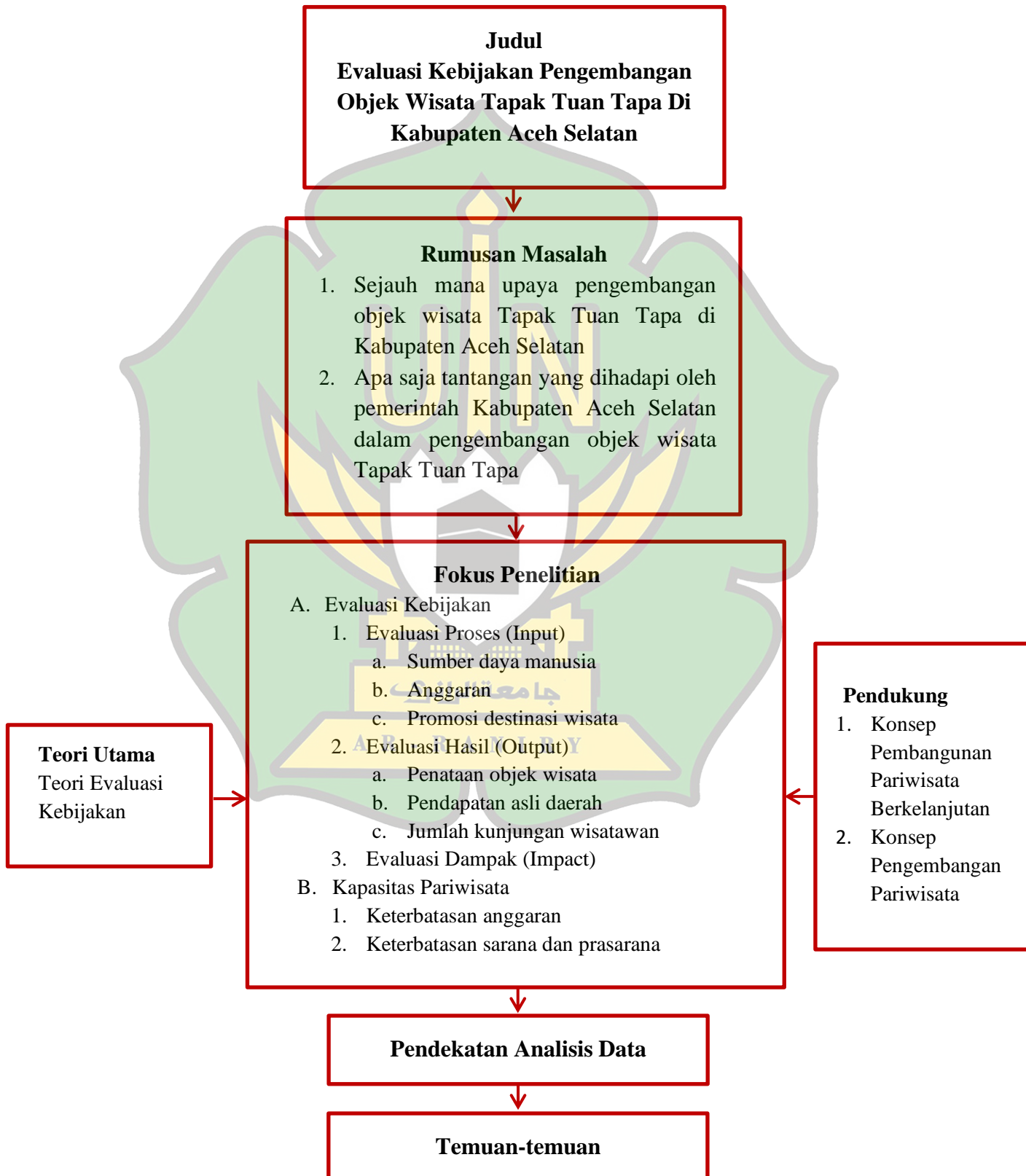
Beberapa peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait dengan pariwisata antara lain sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.
2. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataan.

²⁹ A Reni Widyastuti, Pengembangan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Pelestarian Fungsi Lingkungan, (Medan: Universitas Katolik St. Thomas, 2010), Vol. II, No. 3, Hlm. 80-81

2.3. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka pikir diatas bahwasanya penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengembangan objek wisata Tapak Tuan Tapa di Kabupaten Aceh Selatan. Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran yang membuat perpaduan antara teori dengan fakta observasi serta kajian kepustakaan yang akan dijadikan dasar dalam kegiatan penelitian. Kerangka berpikir juga memuat seluruh permasalahan yang akan diuraikan dalam karya.

Menurut Sugiyono, kerangka berpikir adalah model konseptual yang dimanfaatkan sebagai teori yang ada kaitannya dengan beberapa faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting.³⁰ Untuk melihat pertumbuhan dan kemajuan yang dicapai di sektor pariwisata secara nasional, maka yang seharusnya mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh Selatan memerlukan pelaksanaan program yang kreatif, khususnya dalam pengembangan pariwisata, sarana dan prasarana dan pemanfaatan serta komponen sumber daya yang tersedia di daerah. Oleh karena itu, untuk mengembangkan objek wisata terdapat berbagai *stakeholder* yang terlibat seperti pemerintah, lembaga non pemerintah, SDM, program-program, dana dan fasilitas.

Untuk menjelaskan kondisi atau keadaan serta informasi mengenai suatu objek yang diteliti maka dilakukan evaluasi. Evaluasi ini dapat diartikan sebagai tahapan penilaian yang ditujukan kepada objek evaluasi, untuk mengetahui

³⁰Yusuf Abdhul, Kerangka Pemikiran : Contoh dan Cara Membuat, Deepublish, <https://deepublishstore.com/kerangka-pemikiran/>. Diakses pada 23 Desember 2022

keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasil dideskripsikan dalam bentuk informasi.³¹

Pada teori evaluasi kebijakan terdapat penilaian yang peneliti cantumkan guna untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah kabupaten dalam pengembangan objek wisata Tapak Tuan Tapa di Kabupaten Aceh Selatan. Dengan adanya teori evaluasi kebijakan serta beberapa teori dan konsep pada bab ini peneliti ingin mengetahui sejauh mana upaya pengembangan objek wisata Tapak Tuan Tapa di Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan rumusan masalah serta indikator yang ditetapkan pada fokus penelitian.



³¹Irene Tivani, Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tana Toraja, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), Hlm. 32

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran ataupun penjelasan yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi. Pada dasarnya penelitian kualitatif dilaksanakan dalam keadaan yang alamiah (*natural setting*) dan data yang dikumpulkan umumnya bersifat kualitatif.

Menurut Sugiyono dalam Harbani Pasolong menyebutkan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.³²

3.2. Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif biasanya bertumpu pada suatu fokus. Fokus disini dalam artian pembatasan masalah itu sendiri sebagaimana Albi Anggito menyebutkan bahwa fokus penelitian itu suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian yang bertujuan agar mengetahui secara jelas tentang batasan-batasan mana saja atau untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti supaya sasaran penelitian tidak terlalu luas.³³

³²Harbani Pasolong, Metode Penelitian Administrasi Publik, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2016), Hlm. 161

³³Albi Anggito, dkk, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi : CV. Jejak, 2018), Hlm. 52

Ada dua maksud yang ingin dicapai dengan memfokuskan masalah. *Pertama*, penetapan fokus itu dapat membantu dalam membatasi penyelidikan atau penelitian, artinya jika fokus itu sudah ditentukan, maka secara pasti kita sudah mendapatkan batasan-batasan tentang yang akan diteliti, dan yang lainnya kita sudah tidak perlu lagi menelitinya. *Kedua*, penetapan fokus dapat membantu dalam mengidentifikasi data-data mana yang dibutuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan atau sudah memenuhi bidang *inklusi-enklusi* atau kriteria masuk-keluar informasi yang baru didapatkan, maksudnya peneliti sudah mengetahui data-data mana yang relevan bagi penelitiannya dengan adanya penetapan fokus tersebut.³⁴

Dalam hal ini fokus penelitian akan dapat berkembang dan berubah sesuai sifatnya yang masih tentative seiring dengan perkembangan masalah yang ditentukan lokasi penelitian. Penentuan fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi peneliti sehingga tidak terjebak pada bidang yang sangat umum dan luas atau kurang relevan.

Tabel 3.1

Dimensi dan indikator kebijakan pengembangan objek wisata

Dimensi	Indikator
Evaluasi Kebijakan	a. Evaluasi Proses (<i>Input</i>) b. Evaluasi Hasil (<i>Output</i>) c. Evaluasi Dampak (<i>Impact</i>)

Sumber : Teori menurut Anderson

³⁴ Ibid, Hlm. 53

Tabel 3.2
Dimensi dan indikator tantangan yang dihadapi oleh pemerintah

Dimensi	Indikator
Kapasitas Pariwisata	a. Keterbatasan anggaran b. Keterbatasan sarana dan prasarana

Sumber : Undang-undang nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam sebuah penelitian, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut Nasution, lokasi menunjukkan pada pengertian tempat atau lokasi sosial penelitian yang dicirikan oleh adanya unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi.³⁵ Adapun yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang diungkapkan pada judul skripsi maka penelitian ini berlokasi pada Objek Wisata Tapak Tuan Tapa di Kabupaten Aceh Selatan.

3.4. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data, yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumber data ada dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui studi lapangan dan diperoleh melalui narasumber dengan cara melakukan teknik wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan menggunakan alat untuk

³⁵Surokim, dkk, Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula, (Jawa Timur: Pusat Kajian Komunikasi Publik, 2016), Hlm. 129

membantu dalam proses penelitian seperti alat tulis, alat dokumentasi, dan alat perekam.

2. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari sumber data yang kedua dari data yang kita butuhkan. Data primer berasal dari data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik, diagram, dan sebagainya sehingga menjadi lebih informatif.³⁶ Pengumpulan data sekunder (dokumen) akan dilakukan pada instansi yang terkait seperti Dinas Pariwisata.

3.5. Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan guna menggali informasi yang menjadi dasar rancangan teori dengan keberadaan penelitian tetap dilakukan di Aceh Selatan. Dengan demikian hakikatnya tujuan terpilihnya sampel guna mendapatkan informasi-informasi dan memilih orang-orang yang memungkinkan peneliti mempelajari sejauh mana upaya pengembangan objek wisata Tapak Tuan Tapa di Kabupaten Aceh Selatan. Dan disini sangat diperlukan kepekaan peneliti dalam memenuhi kebutuhan informasi (wawancara, observasi dan pengumpulan data) sesuai dengan problema penelitian. Adapun tabel informan penelitian antara lain sebagai berikut:

³⁶Ardial, Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi, (Jakarta; Bumi Aksara, 2014, Cetakan I), Hlm. 360

Tabel 3.3
Informan Penelitian

No	Informan Penelitian	Jumlah
1.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan	1 (satu) orang
2.	Staf Pemasaran Pariwisata	1 (satu) orang
3.	Staf Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata	1 (satu) orang
4.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Kabupaten Aceh Selatan	1 (satu) orang
5.	Pengelola objek wisata	1 (satu) orang
6.	Wisata Nusantara	2 (dua) orang
7.	Masyarakat di sekitar objek wisata	2 (dua) orang
Jumlah		9 (sembilan) orang

Sumber : Data diolah tahun 2022

Alasan peneliti memilih informan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Alasan peneliti memilih Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan menjadi informan karena sesuai dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Aceh Selatan bahwasanya Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati Aceh Selatan dalam melaksanakan tugas otonomi, tugas pembangunan, serta tugas dekonsentrasi serta penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pariwisata. Oleh karena itu, kepala Dinas Pariwisata bertugas untuk melakukan tugas umum pemerintahan di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Alasan peneliti memilih Staf Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata menjadi informan karena pada seksi ini mempunyai tugas pokok yang membantu kepala bidang pengembangan objek dan daya tarik wisata dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pembinaan

dan pengembangan objek wisata dan daya tarik wisata meliputi atraksi wisata, rekreasi dan hiburan umum di bidang pariwisata.

3. Alasan peneliti memilih Staf Pengembangan Pemasaran Pariwisata menjadi informan karena pada seksi ini mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang pemasaran pariwisata dalam penyusunan bahan perumusan kebijakan, melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi serta evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada seksi pengembangan pasar pariwisata.
4. Alasan peneliti memilih Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Kabupaten Aceh Selatan menjadi informan karena pada bidang ini mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan kerjasama pembangunan; pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan; perdagangan, perindustrian, pariwisata, koperasi dan UMKM serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan ekonomi.
5. Alasan peneliti memilih Pengelola Objek Wisata menjadi informan karena pengelola wisata memiliki peran untuk ikut berpartisipasi terhadap pengembangan objek wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi alam yang dimiliki oleh suatu daerah melalui pariwisata yang memiliki nilai jual yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan daerah lain.

6. Alasan peneliti memilih Wisata Nusantara menjadi informan karena pengunjung objek wisata atau disebut dengan wisatawan memiliki peran yang sangat penting dan sering diposisikan sebagai jantung kegiatan pariwisata itu sendiri. Dengan motif dan latar belakang yang berbeda-beda itu mereka menjadi pihak yang menciptakan permintaan produk dan jasa wisata.
7. Alasan peneliti memilih Masyarakat Lokal di sekitar objek wisata menjadi informan karena masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata, seperti memberikan kontribusi secara terbatas berupa kegiatan pemantauan dampak yang terkait dengan pengembangan pariwisata dan dikembangkan menjadi daya tarik wisata.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan salah satu langkah yang sangat strategis dan sangat penting dalam penelitian karena tanpa mengetahui atau melalui teknik pengolahan data yang baik maka seorang peneliti tidak akan mendapatkan data yang akurat dan memenuhi standar data yang ditetapkan.³⁷

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah merupakan suatu pengamatan secara langsung dengan sistematis terhadap gejala-gejala yang hendak diteliti.³⁸ Pada penelitian ini

³⁷Ismail Suardi Wekke, dkk, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), Hlm. 70

³⁸Harbani Pasolong, Metode Penelitian Administrasi Publik, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2016), Hlm. 131

peneliti mengamati secara langsung pada objek wisata Tapak Tuan Tapa di Kabupaten Aceh Selatan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang secara langsung untuk menggali informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.³⁹ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung dengan informan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk mengarahkan secara bebas pertanyaan-pertanyaan tanpa melupakan esensi dari pertanyaan terkait dengan data yang ingin peneliti kumpulkan, dan pedoman wawancara digunakan agar arah wawancara tetap terkendali dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan penelitian.

3. Analisa Dokumen

Menurut Sugiyono, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dengan demikian bahwa dokumen merupakan sumber data yang turut digunakan guna melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian.⁴⁰ Untuk kepentingan penelitian, peneliti membutuhkan dokumen sebagai bukti otentik dan juga menjadi pendukung suatu kebenaran untuk menguatkan data-data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara yang mendalam.

³⁹Ibid, Hlm. 137

⁴⁰Surokim, dkk, Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula, (Jawa Timur: Pusat Kajian Komunikasi Publik, 2016), Hlm. 244

3.7. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dalam Sugiyono, menyatakan bahwa “Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.”⁴¹

Teknik analisis data dalam suatu penelitian diawali dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan (observasi), dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.⁴²

3.8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik* dan *teori*.

1. Triangulasi sumber
Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

⁴¹Ismail Suardi Wekke, dkk, Metode Penelitian Sosial, (Yogyakarta: CV. Adi Karya Mandiri, 2019), Hlm. 91

⁴²Ibid, Hlm. 89

2. Triangulasi metode
Pengecekan data yang dilakukan kepada data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari wawancara dicek dengan observasi, dokumentasi atau kuisioner
3. Triangulasi penyidik
Triangulasi penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Hal ini dapat membantu mengurangi kemelencengan dalam pengumpulan data. Cara lain ialah membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengan analis lainnya.
4. Triangulasi teori
Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong menyebutkan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.⁴³



⁴³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), Hlm. 330 - 331

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

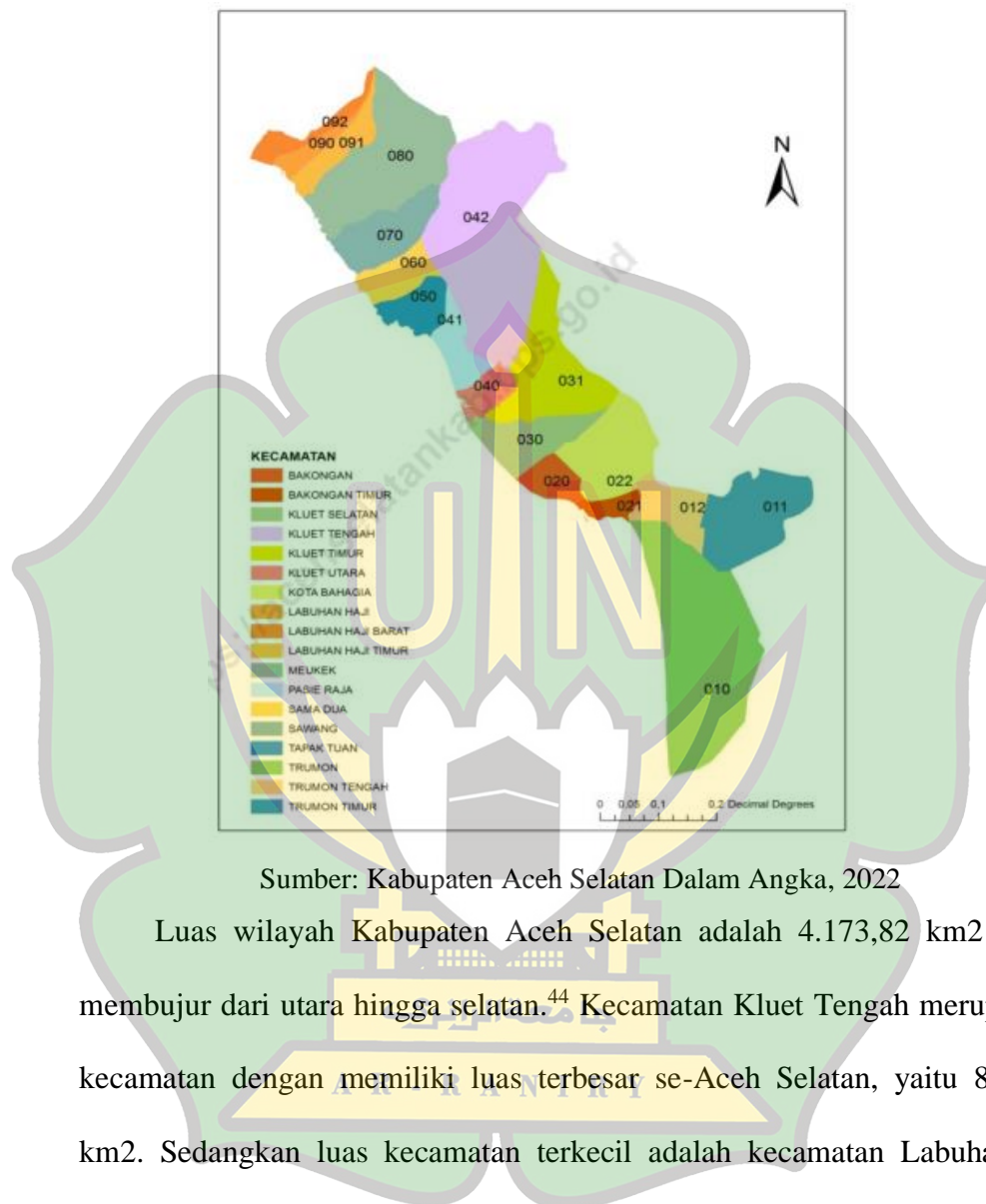
4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Selatan

1. Geografis dan Wilayah Administratif Kabupaten Aceh Selatan

Secara geografis Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah pantai Barat – Selatan dengan ibukota Kabupaten Tapaktuan. Kabupaten Aceh Selatan resmi dibentuk setelah disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956. Kemudian, pada tanggal 10 April 2002 resmi dimekarkan sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2002 menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Selatan (Kabupaten Induk). Kabupaten Aceh Selatan berada di wilayah yang terletak antara 20-40 Lintang Utara (LU) dan 960-900 Bujur Timur (BT). Wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Aceh Selatan telah berkembang menjadi 18 kecamatan, 260 desa dan 43 mukim.

Wilayah Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Gayo Lues di sebelah utara. Sebelah selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil. Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. Dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kabupaten Aceh Selatan



Sumber: Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka, 2022

Luas wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah 4.173,82 km² yang membujur dari utara hingga selatan.⁴⁴ Kecamatan Kluet Tengah merupakan kecamatan dengan memiliki luas terbesar se-Aceh Selatan, yaitu 801,08 km². Sedangkan luas kecamatan terkecil adalah kecamatan Labuhanhaji 54,83 km².

⁴⁴ BPS Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka 2022

Tabel 4.1
Pembagian Luas Wilayah/Daerah

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (Km2)
1.	Trumon	Keude Trumon	765,92
2.	Trumon Timur	Krueng Luas	285,34
3.	Trumon Tengah	Ladang Rimba	123,50
4.	Bakongan	Bakongan	57,62
5.	Bakongan Timur	Seubadeh	73,81
6.	Kota Bahagia	Bukit Gadeng	244,63
7.	Kluet Selatan	Kandang	106,58
8.	Kluet Timur	Paya Dapur	449,03
9.	Kluet Utara	Kota Fajar	73,24
10.	Pasie Raja	Ladang Tuha	98,11
11.	Kluet Tengah	Manggamat	801,08
12.	Tapaktuan	Tapaktuan	100,73
13.	Samadua	Samadua	112,91
14.	Sawang	Sawang	189,38
15.	Meukek	Meukek	465,06
16.	Labuhanhaji	Labuhanhaji	54,83
17.	Labuhanhaji Timur	Peulumat	95,50
18.	Labuhanhaji Barat	Blang Keujeren	76,56
Aceh Selatan			4173,82

Sumber: Aceh Selatan Dalam Angka, 2022

Berada di pesisir pantai dan pegunungan dengan luas wilayah 4.174 km², menjadikan Kabupaten Aceh Selatan salah satu daerah yang banyak objek pariwisata. Adapun 18 kecamatan di dalam kabupaten ini memiliki objek wisata masing-masing dengan berbagai macam destinasi, baik pantai, wisata air, wisata religi, sejarah, dan budaya. Pada tahun 2022, Aceh Selatan memiliki sebanyak 117 objek wisata. Oleh karena itu, memiliki banyak destinasi wisata, merupakan salah satu peluang bagi Aceh Selatan untuk maju dari daerah lainnya.

Tabel 4.2
Daftar Objek Wisata Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022

No	Nama Objek	Jenis Objek	Lokasi		Pemilik
			Gampong	Kecamatan	
1.	Sungai Krueng Baru	Alam	Ds. Kuta Trieng	Labuhanhaji Barat	Masyarakat
2.	Kuburan Syahid	Minat Khusus	Ds. Kuta Trieng	Labuhanhaji Barat	Masyarakat
3.	Makam Syech Muda Waly	Minat Khusus	Ds. Blang Poroh	Labuhanhaji Barat	Masyarakat
4.	Goa Batee Meucanang	Minat Khusus	Ds. Peulokan	Labuhanhaji Barat	Masyarakat
5.	Suluk Pesantren Darussalam	Minat Khusus	Ds. Blang Poroh	Labuhanhaji Barat	Masyarakat
6.	Al-Qur'an Keramat	Minat Khusus	Ds. Kuta Iboh	Labuhanhaji Barat	Masyarakat
7.	Pantai Kuta Iboh	Alam	Ds. Kuta Iboh	Labuhanhaji Barat	Masyarakat
8.	Rumah Raja Peulokan	Budaya	-	Labuhanhaji Barat	Masyarakat
9.	Pantai Ujung	Alam	Ds. Pasar Lama	Labuhanhaji	Masyarakat
10.	Goa Kelongsong	Minat Khusus	Ds. Kamunan Pisang	Labuhanhaji	Masyarakat
11.	Sungai Pagar Gantung	Alam	Ds. Kamunan Pisang	Labuhanhaji	Masyarakat
12.	Al-Qur'an Kampung Dalam	Minat Khusus	Ds. Dalam	Labuhanhaji	Masyarakat

Tabel 4.2 – Lanjutan

No	Nama Objek	Jenis Objek	Lokasi		Pemilik
			Gampong	Kecamatan	
13.	Majelis Tasawuf	Minat Khusus	Ds. Dalam	Labuhanhaji	Masyarakat
14.	Pelabuhan Penyebrangan Antar Pulau	Minat Khusus	Ds. Pasar Lama	Labuhanhaji	Pemda
15.	Pangkalan Pendaratan Ikan	Minat Khusus	Ds. Pasar Lama	Labuhanhaji	Pemda
16.	Pantai Putroe Bate Meutupang	Alam	Ds. Paya Peulumat	Labuhanhaji Timur	Masyarakat
17.	Makam Tuanku Keramat	Minat Khusus	Ds. Limau Saring	Labuhanhaji Timur	Masyarakat
18.	Sungai Batu Berhujan	Alam	Ds. Keumumu Hulu	Labuhanhaji Timur	Masyarakat
19.	Pantai Gosong	Alam	Ds. Biduk Buruk	Labuhanhaji Timur	Masyarakat
20.	Pantai SBB	Alam	-	Labuhanhaji Timur	-
21.	Air Terjun Ceurecue	Alam	Ds. Labuhan Tarok	Meukek	Masyarakat
22.	Pantai Lhok Aman	Alam	Ds. Lhok Aman	Meukek	Masyarakat
23.	Pantai Lhok Bengkuang	Alam	Ds. Blang Kuala	Meukek	Masyarakat
24.	Kuburan Keramat Lhok Aman	Minat Khusus	Ds. Lhok Aman	Meukek	Masyarakat
25.	Sungai Jambo Papeun	Alam	Ds. Jambo Papeun	Meukek	Masyarakat
26.	Majelis Tasawuf	Minat Khusus	Ds. Rot Tengoh	Meukek	Masyarakat
27.	Pangkalan Pendaratan Ikan	Minat Khusus	Ds. Pasie Meukek	Meukek	Pemda
28.	Air Terjun Tuwi Lhok	Alam	Ds. Lhok Pawoh	Sawang	Masyarakat
29.	Sungai Tring Meuduro	Alam	Ds. Trieng Meuduro	Sawang	Masyarakat
30.	Pulau Ujung Seurudong	Alam	Ds. Sawang Ba'u	Sawang	Masyarakat

Tabel 4.2 – Lanjutan

No	Nama Objek	Jenis Objek	Lokasi		Pemilik
			Gampong	Kecamatan	
31.	Pantai Lhok Pawoh	Alam	Ds. Lhok Pawoh	Sawang	Masyarakat
32.	Pertambangan Emas Rakyat	Minat Khusus	Ds. Panton Luas	Sawang	Masyarakat
33.	Pangkalan Pendaratan Ikan	Minat Khusus	Ds. Lhok Pawoh	Sawang	Pemda
34.	Goa Muslimin	Minat Khusus	-	Sawang	Masyarakat
35.	Pantai Batu Berlayar	Alam	Ds. Batee Tunggai	Samadua	Masyarakat
36.	Kolam Setui Indah	Minat Khusus	Ds. Batee Tunggai	Samadua	Masyarakat
37.	Pantai Pasir Putih	Minat Khusus	Ds. Batee Tunggai	Samadua	Masyarakat
38.	Air Terjun Air Dingin	Minat Khusus	Ds. Batee Tunggai	Samadua	Masyarakat
39.	Sungai Sikabu	Alam	Ds. Gunung Ketek	Samadua	Masyarakat
40.	Pantai Cemara Ujung Tanah	Minat Khusus	Ds. Ujung Tanah	Samadua	Masyarakat
41.	Sungai Lubuk Layu	Alam	Ds. Lubuk Layu	Samadua	Masyarakat
42.	Batu Sumbang	Budaya	Ds. Batee Tunggai	Samadua	Masyarakat
43.	Gunung Lampu	Alam	Ds. Pasar	Tapaktuan	Pemda
44.	Tapak, Tongkat Tuan Tapa	Budaya	Ds. Pasar	Tapaktuan	Pemda
45.	RTH Taman Pala Indah	-	-	Tapaktuan	-
46.	Kolam Renang Aroya	Minat Khusus	Ds. Lhok Bengkuang	Tapaktuan	Masyarakat
47.	Masjid Tuo	Budaya	Ds. Padang	Tapaktuan	Masyarakat
48.	Goa Kalam	Minat Khusus	Ds. Jambo Apha	Tapaktuan	Masyarakat
49.	Tugu Proklamasi	Budaya	Ds. Pasar	Tapaktuan	Pemda
50.	Pangkalan Pendaratan Ikan	Minat Khusus	Ds. Lhok Bengkuang	Tapaktuan	Pemda
51.	Bunker Jepang	Budaya	Ds. Lhok Bengkuang	Tapaktuan	Masyarakat

Tabel 4.2 – Lanjutan

No	Nama Objek	Jenis Objek	Lokasi		Pemilik
			Gampong	Kecamatan	
52.	Tugu PKA - 4	Budaya	Ds. Lhok Bengkuang	Tapaktuan	Masyarakat
53.	Batu Sisik Naga	Budaya	Ds. Lhok Bengkuang	Tapaktuan	Masyarakat
54.	Air Terjun Tingkat Tujuh	Alam	Ds. Batu Itam	Tapaktuan	Masyarakat
55.	Aliran Naga	Budaya	Ds. Batu Itam	Tapaktuan	Masyarakat
52.	Tugu PKA - 4	Budaya	Ds. Lhok Bengkuang	Tapaktuan	Masyarakat
56.	Ie Sijuk Panjupian (Arga)	Minat Khusus	Ds. Panjupian	Tapaktuan	Masyarakat
57.	Panorama Hatta	Budaya	Ds. Lhok Rukam	Tapaktuan	Pemda
58.	Pantai Pasir Setumpuk	Alam	Ds. Lhok Rukam	Tapaktuan	Masyarakat
59.	Sungai Air Benting	Alam	Ds. Air Pinang	Tapaktuan	Masyarakat
60.	Bukit Gemilang	Alam	Ds. Lhok Bengkuang	Tapaktuan	Pemda
61.	Bivak Belanda	-	-	Tapaktuan	-
62.	Pantai Cemara Ujung Batu	Alam	Ds. Ujung Batu	Pasie Raja	Masyarakat
63.	Makam Tgk Said Balabareh	Minat Khusus	Ds. Mata Ie	Pasie Raja	Masyarakat
64.	Pantai Pasie Ladang Tuha	Alam	Ds. Ladang Tuha	Pasie Raja	Masyarakat
65.	Gunung Terbang	Budaya	Ds. Ladang Tuha	Pasie Raja	Masyarakat
66.	Sungai Pucok Krueng	Alam	Ds. Pucok Krueng	Pasie Raja	Masyarakat
67.	Bandara T. Cut Ali	Minat Khusus	Ds. Teupin Gajah	Pasie Raja	Pemda
68.	Pantai Lancang Sira	Alam	Ds. Asahan	Pasie Raja	Masyarakat
69.	Pertambangan Emas Rakyat	Minat Khusus	Ds. Paya Teuk	Pasie Raja	Masyarakat
70.	Masjid Tuo Pulo Kambing	Budaya	Ds. Pulo Kambing	Kluet Utara	Masyarakat

Tabel 4.2 – Lanjutan

No	Nama Objek	Jenis Objek	Lokasi		Pemilik
			Gampong	Kecamatan	
71.	Pantai Pasie Kuala Ba'u	Alam	Ds. Kuala Ba'u	Kluet Utara	Masyarakat
72.	Bupaleh (Bentang) Kuala Ba'u	Budaya	Ds. Kuala Ba'u	Kluet Utara	Masyarakat
73.	Rumoh Rayeuk	Budaya	Ds. Kuala Ba'u	Kluet Utara	Masyarakat
74.	Rumah Raja Kejruen Mukmin	Budaya	-	Kluet Utara	Masyarakat
75.	Irigasi Gunong Pudong	Alam	Ds. Kampung Payo	Kluet Utara	Pemda
76.	Makam Abuya Syeh H. Jailani Musa	-	-	Kluet Utara	-
77.	Arung Jeram Jambor TeKa Mega	Alam	Ds. Lawe Melang	Kluet Tengah	Masyarakat
78.	Rumah Rungko Adat Kluet	Budaya	Ds. Koto Indarung	Kluet Tengah	Pemda
79.	Sungai Arung Jeram Simpali	Budaya	Ds. Simpali	Kluet Tengah	Masyarakat
80.	Pertambangan Emas Rakyat	Minat Khusus	Ds. Simpang Tiga	Kluet Tengah	Masyarakat
81.	Danau Teluk Belango	Alam	Ds. Malaka	Kluet Tengah	Masyarakat
82.	Makam T. Panglima Raja Lelo	Budaya	Ds. Sapik	Kluet Timur	Masyarakat
83.	Irigasi Paya Dapur	Alam	Ds. Paya Dapur	Kluet Timur	Masyarakat
84.	Tapak Aulia	Budaya	Ds. Kubang Gajah	Kluet Timur	Masyarakat
85.	Pusat Penelitian Orang Hutan	Minat Khusus	Ds. Suak Belimbing	Kluet Timur	Pemda
86.	Hutan Lindung TNGL	Alam	Ds. Rantau Sialang	Kluet Selatan	Pemda
87.	Pantai Cemara Lubuk Sipuru	Budaya	Ds. Lhok Jamin	Kluet Selatan	Masyarakat
88.	Makam T. Cut Ali	Minat Khusus	-	Kluet Selatan	Masyarakat

Tabel 4.2 – Lanjutan

No	Nama Objek	Jenis Objek	Lokasi		Pemilik
			Gampong	Kecamatan	
89.	Kebun Binatang Mini	Minat Khusus	Ds. Suak Bakung	Kluet Selatan	Pemda
90.	Danau Genting Buaya	Alam	Ds. Pasie Lembang	Kluet Selatan	Pemda
91.	Pantai Ujung Karang	Alam	Ds. Lhok Jamin	Bakongan	Masyarakat
92.	Pulau Pasir	Alam	Ds. Lhok Jamin	Bakongan	Masyarakat
93.	Pantai Ujung Kuala	Alam	Kota Bakongan	Bakongan	Masyarakat
94.	Irigasi Beutong	Minat Khusus	-	Kota Bahagia	Masyarakat
95.	Air Terjun Alur Buloh	Alam	-	Kota Bahagia	Masyarakat
96.	Makam T. Raja Angkasah	Budaya	-	Kota Bahagia	Pemda
89.	Kebun Binatang Mini	Minat Khusus	Ds. Suak Bakung	Kluet Selatan	Pemda
90.	Danau Genting Buaya	Alam	Ds. Pasie Lembang	Kluet Selatan	Pemda
91.	Pantai Ujung Karang	Alam	Ds. Lhok Jamin	Bakongan	Masyarakat
92.	Pulau Pasir	Alam	Ds. Lhok Jamin	Bakongan	Masyarakat
93.	Pantai Ujung Kuala	Alam	Kota Bakongan	Bakongan	Masyarakat
94.	Irigasi Beutong	Minat Khusus	-	Kota Bahagia	Masyarakat
95.	Air Terjun Alur Buloh	Alam	-	Kota Bahagia	Masyarakat
96.	Makam T. Raja Angkasah	Budaya	-	Kota Bahagia	Pemda
97.	Danau Laut Bangko	Minat Khusus	-	Kota Bahagia	Masyarakat
98.	Monumen Kuburan Massal	Budaya	-	Kota Bahagia	Pemda
99.	Jambo Kapuk	-	-	Kota Bahagia	Masyarakat
100.	Pulau Dua	Alam	-	Bakongan Timur	Masyarakat

Tabel 4.2 – Lanjutan

No	Nama Objek	Jenis Objek	Lokasi		Pemilik
			Gampong	Kecamatan	
101.	Pantai Lhok Jamin	Alam	-	Bakongan Timur	Masyarakat
102.	Air Terjun Simpang	Alam	-	Bakongan Timur	Masyarakat
103.	Sungai Seulekat	Minat Khusus	Ds. Seulekat	Bakongan Timur	Masyarakat
104.	Panorama Gunung Kapur	Alam	-	Trumon Tengah	Masyarakat
105.	Gunung Calok Bate	Alam	-	Trumon Tengah	Masyarakat
106.	Air Terjun Senebok Buloh	Alam	-	Trumon Tengah	Masyarakat
107.	Batu Bersurat	Budaya	-	Trumon Tengah	Masyarakat
108.	Air Terjun Simpang II	Alam	-	Trumon Tengah	Masyarakat
109.	Air Terjun Gunung Lamidin CRU Naca	Alam	-	Trumon Tengah	Masyarakat
110.	Air Terjun Tangga Seribu	Alam	-	Trumon Tengah	Masyarakat
111.	Pantai Trumon	Alam	Trumon	Trumon	Masyarakat
112.	Makam Raja Trumon	Budaya	Trumon	Trumon	Masyarakat
113.	Benteng Raja Trumon	Budaya	Trumon	Trumon	Masyarakat
114.	Pulau-Pulau Trumon	Alam	Trumon	Trumon	Masyarakat
115.	Pulau Nibong	Alam	Trumon	Trumon	Masyarakat
116.	Irigasi Jambo Dalem	Minat Khusus	Jambo Dalem	Trumon Timur	Pemda
117.	Gunung Tengku	Alam	-	Trumon Timur	Masyarakat

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan pada tabel di atas, Kabupaten Aceh Selatan sendiri memiliki berbagai macam destinasi objek wisata di setiap kecamatan baik itu wisata air, pantai, religi, sejarah, dan budaya. Dengan kekayaan alam di suatu wilayah,

tentunya dapat meningkatkan perekonomian daerah dan memajukan pelestarian alam dengan cara mempromosikan destinasi wisata, menjaga lingkungan, adanya penunjang sarana prasarana agar dapat memperkenalkan ke wisatawan yang ada di daerah maupun luar daerah. Adapun objek wisata yang telah dikenal ke khalayak masyarakat luar, seperti objek wisata Air Terjun Tingkat Tujuh, wisata Ie Sijuk Panjupian, Panorama Hatta, Pulau Dua, Pantai Pasir Setumpuk, wisata Kolam Renang Aroya, RTH Taman Pala Indah, dan lain-lain.

Adapun salah satu objek wisata yang telah banyak dikenal akan budaya dan sejarahnya oleh wisatawan yaitu objek wisata Tapak Tuan Tapa yang dimana objek tersebut belum memperbaiki bangunan atau prasarana jembatan layang menuju objek wisata sehingga masih perlu adanya pembenahan atau renovasi. Berikut ini kondisi bangunan objek wisata Tapak Tuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan.

Gambar 4.2

Kondisi Bangunan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan





Sumber: Dokumen Peneliti, 2023

AR-RANIRY

4.1.2. Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan

Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan terletak di Kabupaten Aceh Selatan Gampong Lhok Ketapang, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah bidang Pariwisata. Dinas Pariwisata sebagaimana dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas

Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah dibidang Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan untuk Kabupaten.⁴⁵

1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan

Perumusan visi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan mencerminkan apa yang ingin dicapai pada masa akhir periode tertentu, yaitu dengan mempertimbangkan kondisi saat ini, sumber daya manusia dan beberapa kebijakan serta strategi yang akan di tempuh, maka dapat dirumuskan visi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan yaitu "Mengembangkan potensi daerah sebagai daerah tujuan wisata dan terwujudnya pembangunan di bidang pariwisata menuju masyarakat yang sejahtera."

Adapun misi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.
- b. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.⁴⁶

Sebagai penjabaran diatas, maka misi Dinas Pariwisata menetapkan tujuan. Tujuan adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan dapat dijadikan sebagai petunjuk (indikator) dari pencapaian misi organisasi.

⁴⁵ <https://dispar.acehselatankab.go.id/> (diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 15.50 WIB)

⁴⁶ <https://dispar.acehselatankab.go.id/> (diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 15.55 WIB)

2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan disebutkan bahwa, Dinas Pariwisata mempunyai Tugas yaitu membantu Bupati Aceh Selatan dalam melaksanakan Tugas Otonomi, Tugas Pembangunan, serta Tugas Dekonsentrasi serta Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pariwisata untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan mempunyai Fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Kebijaksanaan Umum Daerah Bidang Pariwisata;
- b. Melaksanakan Kebijakan Teknis Bidang Pariwisata;
- c. Melaksanakan kerja sama dengan Instansi dan Organisasi lain yang menyangkut Bidang Pariwisata;
- d. Menetapkan Kebijakan Tehnis Bidang Pariwisata;
- e. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Bupati.

Sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tersebut diatas, maka pada prinsipnya tugas dan fungsi tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Pariwisata.
- b. Pemberian rekomendasi perizinan dan pelaksanaan umum.
- c. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas.

- d. Melaksanakan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan Bupati berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- e. Menentukan dan mengendalikan atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- f. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengembangan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa Di Kabupaten Aceh Selatan

Secara umum, pengembangan pariwisata haruslah dilakukan sesuai dengan perencanaan dan strateginya, serta memenuhi tujuan yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Pengembangan pariwisata merupakan suatu usaha secara berencana dan terstruktur untuk membenahi objek dan kawasan yang ada dan membangun objek dan kawasan wisata yang baru yang akan dipasarkan kepada masyarakat luar maupun daerah. Dalam pengembangan pariwisata dilakukan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun nilai-nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal yang islami, dan berorientasi pada pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya masyarakat serta lingkungan hidup.⁴⁷

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan pasal 12 ayat 1 menjelaskan bahwasanya “Pengembangan usaha pariwisata Aceh ditujukan untuk tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan

⁴⁷ Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan, Hlm. 6

ekonomi bagi masyarakat, terutama masyarakat sekitar objek dan daya tarik wisata, dan akselerasi pembangunan Aceh”.⁴⁸

Kebijakan pengembangan pariwisata menjadi konsep yang merujuk pada akuntabilitas kinerja suatu organisasi dalam rangka pengembangan objek wisata yang baik, yang bertujuan untuk memastikan bahwasanya pengembangan pariwisata (termasuk objek wisata) berjalan dengan baik maka diperlukan strategi untuk tercapainya pengembangan objek wisata yang dapat meningkatkan perekonomian di suatu daerah, terutama masyarakat sekitar objek wisata dan daya tarik wisata. Dengan hal ini kebijakan pemerintah menerapkan strategi untuk merevitalisasi dan mengoptimalkan objek destinasi tujuan wisata agar tercapainya perekonomian meningkat dengan menerapkan adanya sumber daya manusia, promosi destinasi wisata, adanya infrastruktur, adanya pendapatan asli daerah agar terciptanya pengembangan objek wisata yang baik.

Kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan untuk meningkatkan pengembangan pariwisata adalah dengan menyusun strategi kegiatan perencanaan dan pengembangan pariwisata dengan kegiatan revitalisasi dan mengoptimalkan destinasi tujuan wisata, menciptakan event dalam menunjang pariwisata daerah dan peningkatan pendapatan PAD sektor pariwisata.⁴⁹

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan sarana dan prasarana kepariwisataan, mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing, destinasi yang unggul serta pemasaran dan promosi pariwisata yang berkelanjutan merupakan tugas terbesar yang diperankan oleh Dinas Pariwisata

⁴⁸ Ibid, Hlm. 7

⁴⁹Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023, Hlm.

Kabupaten Aceh Selatan. Menjaga kawasan atau lokasi objek wisata menjadi peran pengelola untuk mengupayakan pelestarian alam, memberikan pelayanan yang baik kepada kunjungan wisatawan serta pendukung ekonomi masyarakat dan ini tentunya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan adanya bersosialisasi mengenai pariwisata kepada masyarakat sekitar objek, mengarahkan kepada wisatawan untuk dapat berkunjung dan memberikan rasa kenyamanan.

Evaluasi kebijakan menjadi suatu kegiatan yang merujuk pada penilaian kebijakan yang mencakup proses, hasil dan dampak kebijakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dan dapat membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target. Dengan hal ini kebijakan pemerintah yang merujuk pada Renstra yang mana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pariwisata melalui program pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan yang ditugaskan kepada Dinas Pariwisata dapat menilai bagaimana hasil capaian yang telah direncanakan.

Setiap perumusan suatu program tentu adanya pelaksanaan. Pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan harus sejalan dengan kondisi yang ada saat ini, yang mana dalam kegiatannya harus melibatkan beberapa unsur yang disertai dengan usaha-usaha dan alat-alat penunjang. Pelaksanaan suatu program adalah sesuatu yang harus berhati-hatian dan bahkan pada saat penyusunannya.

Jadi pelaksanaan itu mencakup dari kegiatan yang telah direncanakan dan tindakan hasil yang berdampak positif maupun negatif.⁵⁰

Dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu fokus pemerintah. Agar pembangunan dan pengembangan pariwisata dapat dilakukan secara optimal dan merata, maka diperlukan adanya suatu pola pengelolaan pengembangan pariwisata yang komprehensif, strategis, efisien dan efektif yang dapat menguntungkan semua *stakeholder* yang terlibat untuk kepentingan kelembagaan, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.⁵¹

Agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik maka perlu adanya beberapa dimensi dan indikator yang berkaitan dengan penilaian suatu kebijakan antara lain sebagai berikut:

1. Evaluasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa Di Kabupaten Aceh Selatan

A. Proses (*Input*)

Proses ini merinci pada berbagai aktivitas yang harus dikerjakan untuk dapat menyelesaikan program-program yang direncanakan dalam suatu organisasi pemerintahan. Berbicara hal yang mengenai proses yang dilalui untuk melaksanakan program pengembangan pariwisata. Proses atau *input* secara keseluruhan dimulai dari perencanaan awal yang telah berjalan sebagaimana mestinya, yaitu melalui para *stakeholder* yang terlibat dan tokoh masyarakat sampai kepada penyusunan program dan anggaran yang dibutuhkan.

⁵⁰Irene Tivani, Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tana Toraja, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016), Hlm. 60

⁵¹Ibid, Hlm. 61

1) Sumber Daya Manusia

Pariwisata merupakan sebuah industri yang sangat bergantung pada keberadaan manusia. Untuk menciptakan pariwisata ini, harus terwujudnya interaksi dari manusia yang melakukan wisata yang mana ikut berperan sebagai konsumen yaitu pihak-pihak yang melakukan perjalanan wisata/wisatawan dan manusia sebagai produsen yaitu pihak-pihak yang menawarkan produk dan jasa wisata. Sehingga dalam aspek ini manusia salah satunya yang berperan sebagai motor penggerak bagi kelangsungan industri pariwisata itu di suatu negara. Sumber daya manusia (SDM) pariwisata merupakan individu/pelaku industri pariwisata yang secara langsung maupun tidak langsung yang terkait dengan seluruh komponen pariwisata.⁵²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan pasal 30 menjelaskan bahwasanya “Pemerintah kabupaten berwenang: Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota; Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota; Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota; Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata; Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya; Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya; Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru; Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota; Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di

⁵²Sri Pajriah, Peran Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Di Kabupaten Ciamis, (Jawa Barat: Universitas Galuh Ciamis, 2018), Vol. 5, No. 1, Hlm. 29

wilayahnya; Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.”⁵³

Namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Staf Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan, peneliti menemukan berbagai informasi di lapangan terkait dengan kualitas sumber daya aparatur Dinas Pariwisata dalam mengembangkan objek wisata Tapak Tuan Tapa menyebutkan bahwa:

“Dalam mengembangkan objek wisata Tapak, sejauh ini kami sudah melaksanakan pendataan dari pengelola objek wisata, telah mengontrol lokasi objek wisata Tapak dan telah melakukan promosi wisata dengan menerapkan city branding. Pada tahun 2022 adanya konflik perebutan tanah pemilikan di lokasi objek tersebut. Hal ini dikarenakan tanah kepemilikan belum sepenuhnya milik pemda. Jadi, kami sudah menangani kepada pihak tersebut seperti menggelarkan pelelangan dalam waktu dua tahun sekali dengan kontrak yang telah disepakati. Dalam hal pengawasan, kami mengontrol seminggu sekali terjun lapangan untuk memantau bagaimana pengelola dalam menjaga kebersihan, fasilitas dan melihat kondisi di sekitaran objek wisata Tapak. Oleh karena itu dari pihak pemerintah bekerja sama dengan pengelola dengan melapor dalam retribusi pajak parkir.”⁵⁴

Dari Pengelola Objek Wisata Tapak juga menyebutkan bahwa:

“Pihak pariwisata sering mengontrol tidak lepas dari tanggung jawab dan pengawasan dari Dinas Pariwisata. Saya sebagai pengelola harus melaporkan setiap bulannya bagaimana kondisi wisata Tapak dan menyeter di kas daerah. Dinas Pariwisata turun melihat kondisi lokasi objek Tapak. Dalam hal mengontrol, mereka setiap minggunya ada petugas dari dinas pariwisata.”⁵⁵

Dalam penyelenggaraan bidang Pariwisata, Dinas Pariwisata memberikan pelayanan kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam

⁵³Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Hlm. 20-21

⁵⁴Wawancara Bersama Staf Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan, 26 Januari 2023

⁵⁵Wawancara dengan Pengelola Objek Wisata Tapak Tuan Tapa pada Tanggal 26 Januari 2023

pengembangan pariwisata dari tingkat gampong, kecamatan, kabupaten dan provinsi serta pusat sebagai sarana menghimpun berbagai aspirasi dan kebutuhan pembangunan di daerah yang dibutuhkan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk meningkatkan peran serta partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan kemitraan pariwisata, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan melakukan pelatihan-pelatihan yang terkait pengembangan sektor pariwisata bagi masyarakat melalui kegiatan penyuluhan tentang Sapta Pesona dalam membentuk kegiatan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) kepada masyarakat disekitar lokasi wisata, memfasilitasi pembentukan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata, melaksanakan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata serta kegiatan pengembangan SDM dan profesional bidang pariwisata.

2) Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan program atau kegiatan dalam kebijakan pengembangan objek wisata ini, perlu adanya dana yang diperoleh pihak instansi yang terkait dari beberapa pihak. Dana yang dianggarkan ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Karena pariwisata Kabupaten Aceh Selatan sangat menunjang Pendapatan Asli Daerah, sehingga pemerintah juga memberikan bantuan.

Adapun uraian anggaran program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Anggaran Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata
Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2020 – 2022

No	Program dan Kegiatan	2020		2021		2022	
		Target Anggaran	Realisasi	Target Anggaran	Realisasi	Target Anggaran	Realisasi
1.	Program Pemasaran Pariwisata						
	a. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Rp. 27.628.000	Rp. 27.628.000	Rp. 131.908.000	Rp. 131.888.800	Rp. 183.705.250	Rp. 172.283.250
	b. Fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota	Rp. 121.813.000	Rp. 121.125.000	Rp. 100.000.000	Rp. 98.835.000	Rp. 123.206.000	Rp. 123.206.000
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						
	a. Perencanaan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Rp. 530.000.000	Rp. 523.371.696	Rp. 227.430.155	Rp. 189.929.622	Rp. 265.198.000	Rp. 264.698.000
	b. Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Rp. 2.364.000.000	Rp. 2.318.511.000	Rp. 3.674.500.000	Rp. 3.610.167.753	Rp. 1.050.000.000	Rp. 0
Total		Rp. 3.043.441.000	Rp. 2.990.635.696	Rp. 4.133.838.155	Rp. 4.030.821.175	Rp. 1.622.109.250	Rp. 560.187.250

Sumber: Data diolah dari data sekunder Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan

Tahun 2020-2022

Berdasarkan data yang diatas bahwasanya pada masing-masing program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan untuk anggaran 2020 mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan penganggaran untuk program dan kegiatan di Dinas Pariwisata. Penganggaran ini telah dilakukan pemotongan anggaran yang disebabkan oleh kondisi pandemi covid-19 yang telah terjadi di Indonesia, sehingga hal ini sangat mempengaruhi kondisi dari kinerja Dinas Pariwisata yang tidak dapat memberikan hasil yang maksimal dari perencanaan diawal penganggaran. Banyaknya kegiatan yang batal dilaksanakan dapat mempengaruhi kepada kurangnya kunjungan wisatawan ke daerah Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh target setoran pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata kurang maksimal.

Pada tahun 2021 anggaran yang diperoleh meningkat dikarenakan pada program pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota telah dibangun objek-objek wisata baru yang memiliki potensial yang baik. Dinas Pariwisata dialokasikan anggaran untuk meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pembangunan destinasi wisata baru dapat menjadi nilai yang diperoleh pendapatan asli daerah di bidang sektor pariwisata. Dengan hal ini Dinas Pariwisata merealisasikan anggaran untuk mewujudkan visi dan misi program-program yang telah dilaksanakan seperti adanya beberapa objek wisata baru yang terpilih masuk nominasi API (Anugerah Pesona Indonesia).

Pada objek wisata Tapak Tuan Tapa pemerintah belum menyegerakan untuk menindaklanjuti pembenahan prasarana pada objek wisata tersebut. Pada tahun 2022 Dinas Pariwisata telah merencanakan untuk melanjutkan pembenahan objek wisata Tapak Tuan Tapa. Namun, pemerintah belum terlaksana disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran dan adanya konflik rebutan hak tanah kepemilikan pada objek wisata yang dikarenakan belum sepenuhnya milik pemerintah daerah.

3) Promosi Destinasi Wisata

Untuk meningkatkan dan mengembangkan produk wisata yang ada, maka pemerintah daerah kabupaten Aceh Selatan melakukan kebijakan pengembangan destinasi wisata. Program pengembangan destinasi wisata ini berkaitan dengan pengembangan daya tarik objek wisata dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan pengembangan objek wisata yaitu berupa perbaikan dan penyediaan terhadap sarana prasarana penunjang wisata serta adanya survey dan investigasi yang dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan objek wisata yang berpotensi untuk dikembangkan seperti sarana prasarana pendukung, daya tarik objek, aksesibilitas menuju objek wisata, aspek lingkungan dan masyarakat.

Perkembangan dan kemajuan setiap objek wisata di suatu wilayah tentunya tidak terlepas dari kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan. Melalui Dinas Pariwisata yang harus mampu membangun dan mengembangkan wisata di Aceh Selatan melalui *city branding*. *City Branding* merupakan konsep

untuk mempromosikan dan mengenalkan satu kota kepada semua wisatawan publik, sebagai jasa dan produk serta organisasi.

City branding adalah suatu strategi peranan penting untuk mempromosikan wisata, promosi ialah suatu cara institusi dalam melahirkan kesadaran atau lebih menginformasikan dan memberitahu kepada konsumen untuk tertarik datang ke tempat yang di promosikan. Hal ini sangatlah penting karena semakin luas promosi wisata Aceh Selatan maka akan semakin tinggi minat para pengunjung terhadap wisata Aceh Selatan dan akan semakin banyak dikenal oleh para wisatawan luar.⁵⁶

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataaan pasal 66 ayat (a) menjelaskan bahwasanya “Penyediaan, penyebaran dan pemberian informasi pariwisata Aceh kepada wisatawan dan badan-badan lain yang memerlukan.”⁵⁷ Hal ini bertujuan untuk dapat bekerjasama dengan badan usaha yang terkait agar suatu program dapat memberikan hasil yang maksimal dalam pemasaran pariwisata untuk meningkatkan investasi pariwisata.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan Staf Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata menyebutkan bahwa:

“Salah satu upaya dan strategi *city branding* ini yaitu dengan meningkatkan promosi wisata melalui media elektronik dan media cetak, baik media lokal maupun media nasional. Dinas pariwisata juga menjalin kerjasama dengan sejumlah media di Aceh agar promosi untuk *city branding* wisata di Aceh Selatan berjalan maksimal.”⁵⁸

⁵⁶Sri Maulida, Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan City Branding Pada Promosi Wisata Kabupaten Aceh Selatan, (Meulaboh: Universitas Teuku Umar, 2022), Vol. 1, No. 2, Hlm. 48

⁵⁷Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisataaan, Hlm. 19

⁵⁸Wawancara dengan Staf Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 26 Januari 2023

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwasanya Dinas Pariwisata berupaya untuk meningkatkan promosi wisata telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya artikel dan tulisan di sejumlah media elektronik di Aceh yang menyajikan berita pariwisata di Aceh Selatan. Selain itu, melalui event nasional yaitu Anugerah Pesona Indonesia (API) menjadi salah satu strategi *city branding* yang dilakukan Pemkab Aceh Selatan hingga berhasil menjadi juara umum tingkat nasional pada tahun 2021 melalui destinasi wisata Samadua, cinderamata Rencong Batu dan Bukit Sigantang Sira.

Pada tahun 2022, Aceh Selatan juga kembali mengencangkan promosi wisata ke tingkat nasional dengan masuknya destinasi wisata Pulau Dua dan Situs Sejarah Benteng Trumon pada event API tersebut. Melalui strategi itu diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke Aceh Selatan dan meningkat citra wisata daerah ke tingkat nasional.

Berikut bentuk media cetak yang dilakukan oleh pemerintah dalam mempromosikan destinasi wisata kepada publik

Gambar 4.3
Brosur Destinasi Wisata Kabupaten Aceh Selatan





Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan

Informasi yang ditampilkan pada salah satu media cetak (brosur) ini bertujuan untuk mengupayakan agar dapat memberikan informasi kepada khalayak atau pengunjung wisatawan agar dapat mengetahui lokasi objek-objek wisata dan bisa dikenal kepada publik. Jadi pada promosi destinasi wisata ini dapat mengoptimalkan perekonomian daerah dengan adanya sumber daya alam dan meningkatkan pendapatan asli daerah di sektor pariwisata. Hal ini sebagai bentuk transparansi yang mana dapat menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.

Adapun hambatan dalam mempromosikan wisata Aceh Selatan melalui *City branding* yaitu kekurangan biaya di setiap keperluan dan kurangnya kerja keras para pegawai terhadap suatu permasalahan. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Staf Pemasaran Dinas Pariwisata menyebutkan bahwa:

“Untuk mengelola dan mengembangkan satu objek wisata, pemerintah harus menggelontorkan anggaran puluhan hingga ratusan juta, hal ini untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana di lokasi serta promosi sebagai bentuk *city branding* objek wisata. Selain itu, dalam mengelola objek wisata juga dibutuhkan dukungan masyarakat setempat dalam melayani dan menerima wisatawan yang datang. Hal ini bertujuan agar para pengunjung merasakan kenyamanan dalam berkunjung”⁵⁹

⁵⁹Wawancara dengan Staf Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 26 Januari 2023

Oleh karena itu, banyaknya objek wisata di Kabupaten Aceh Selatan tentunya membutuhkan anggaran yang sangat besar dalam mengembangkannya. Namun pemerintah daerah terus melakukan upaya-upaya dalam mempromosikan destinasi wisata Aceh Selatan melalui program event nasional, promosi di media serta menyelenggarakan sejumlah kegiatan. Dinas Pariwisata perlu pengembangan wisata yang merata di Kabupaten karena masih banyak destinasi wisata yang tidak diketahui oleh publik. Meskipun memerlukan anggaran dan biaya yang besar tetapi keuntungan dalam mengembangkan objek wisata tentunya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah di sektor pariwisata.

B. Hasil (*Output*)

1) Penataan Objek Wisata

Aceh Selatan sebagai daerah yang terkenal dengan pariwisatanya memang sudah terkenal dengan beberapa objek wisata yang sudah ada sejak lama namun tetap di unggulkan hingga sekarang ini. Ie sijuk panjupian, tapak tuan tapa, air terjun ie dingin, pantai pasir putih, dan lainnya merupakan objek wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Oleh karena itu, untuk memajukan objek wisata ini, pihak Dinas Pariwisata membuat program yang dimana untuk penataan peninggalan sejarah pada objek wisata Tapak Tuan Tapa agar pengelolaan wisata tersebut lebih baik lagi.

Penataan yang dimaksud yaitu dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung yang ada dilokasi objek wisata, seperti pembuatan jalan jembatan layang Tapak Tuan Tapa, toilet yang jumlahnya bertambah. Kemudian papan

informasi objek, warung/café, tempat sampah dan fasilitas lainnya. Pada objek wisata Tapak Tuan Tapa ini tidak hanya memanjakan oleh pemandangan laut di sepanjang jalan menuju jejak kaki Tapak Tuan Tapa, tetapi dengan kondisi jalan yang sebagian sudah di perbaiki oleh pengelola dan bagian atap pada tenda di sekitar objek masih belum diperbaiki dengan baik dikarenakan pada tahun ini masa penghapusan aset-aset yang ada pada objek wisata Tapak. Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pariwisata menyebutkan bahwa:

”Dalam kunjungan wisata Tapak ini, kami berencana dalam 2 bulan ini akan merenovasi jembatan layang Tapak dan setelah direhabilitasi maka akan dilakukan perencanaan dalam pembenahan jembatan layang itu. Untuk sementara ini, para pengunjung akan dialihkan ke anjungan wisata Tapak yang berada di atas tebing gunung lampu agar dapat terlihat jejak kaki Tapak Tuan Tapa dari atas permukaan laut. Jadi nantinya pemerintah akan membuat papan himbauan dikarenakan bagian bawah jalan jembatan layang Tapak sedang diperbaiki.”⁶⁰

Saat peneliti berkunjung ke lokasi objek wisata tersebut, yang terlihat memang sudah bisa dikatakan sebagian jalan menuju Tapak sudah diperbaiki dengan papan dan dipaling ujung jalan masih belum diperbaiki dengan layak. Namun fasilitas yang ada masih bisa di pergunakan dengan baik. Berdasarkan wawancara peneliti dengan pengelola objek wisata Tapak Tuan Tapa menyebutkan bahwa:

“Sarana dan prasarana di sini memang sudah lengkap, akan lebih bagus lagi jika ditingkatkan. Seperti tempat sampah akan lebih baik jika jumlahnya ditambah. Kalau masalah kebersihan di objek wisata Tapak ini sudah lumayan, karena ini semua tanggung jawab dari si pengelola seperti penyediaan air, listrik, dan sebagainya. Kawasan objek wisata ini berada di lingkungan desa pasar yang turut mendukung masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Masalah perbaiki jembatan layang pada objek wisata saat ini sementara hanya penghapusan aset pada bagian item-

⁶⁰Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 24 Januari 2023

itemnya saja seperti memotong bagian atas atap dan bagian-bagian yang diperlukan untuk menjaga keamanan pengunjung.”⁶¹

Pada saat peneliti observasi dilapangan, ada beberapa yang masih dalam proses perbaikan sehingga perlu adanya kesadaran individu maupun kelompok masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut di atas tidak begitu maksimal, usaha pengembangan daerah tujuan wisata yang dilakukan sesuai dengan kondisi anggaran yang ada. Adapun sedikit usaha untuk memelihara proyek yang telah diselesaikan adalah dengan mengadakan kegiatan kerja bakti untuk menjaga kebersihan objek.

2) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Banyaknya objek wisata dan jumlah kunjungan wisatawan di Aceh Selatan maka akan menunjang pendapatan daerah di Aceh Selatan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang dihasilkan oleh Kabupaten Aceh Selatan. Setiap tahun pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Selatan mengalami penurunan. Untuk mengetahui perkembangan pendapatan asli daerah di Aceh Selatan pada tahun 2020-2021 dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.4
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Selatan
Tahun 2020-2022

Tahun	PAD Aceh Selatan
2020	Rp. 30.021 Juta
2021	Rp. 29.698 Juta

Sumber: Data Sekunder Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan

⁶¹Wawancara dengan Pengelola Objek Wisata Tapak Tuan Tapa pada Tanggal 26 Januari 2023

Tabel 4.5
Pendapatan Asli Daerah pada Objek Wisata Tapak Tuan Tapa
Tahun 2020-2022

Tahun	Target Anggaran	Realisasi
2020	Rp. 35.150 Juta	Rp. 23.750 Juta
2021	Rp. 35.150 Juta	Rp. 29.650 Juta
2022	Rp. 35.150 Juta	Rp. 22.700 Juta

Sumber: Data Sekunder Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan

Untuk menciptakan destinasi unggulan, Kabupaten Aceh Selatan mulai fokus untuk membuat kebijakan yang mana kebijakan tersebut salah satunya dari visi dan misi Dinas Pariwisata dalam mewujudkan perencanaan untuk merevitalisasi dan mengoptimalkan destinasi tujuan wisata, dan peningkatan pendapatan PAD sektor pariwisata.

Proses pengusulan dan pelaksanaan program kepariwisataan, melalui usulan masyarakat, pemerintah dan sampai kepada penetapan kebijakan dan melalui kebijakan kemudian menghasilkan suatu program. Program dan kegiatan sebagaimana implementasi dari pengembangan pariwisata sudah tercatat dengan baik. Tetapi dalam hal pelaksanaan dilapangan pada kenyataannya tidak lagi sesuai dengan apa yang hendak dicapai sebelumnya. Salah satunya adalah tempat objek wisata Tapak Tuan Tapa yang dimana kegiatan merevitalisasi dan mengoptimalkan destinasi tujuan wisata belum sepenuhnya berhasil dikarenakan sarana dan prasarana pada objek wisata tersebut belum maksimal dalam membenahi fasilitas yang ada.

Kabupaten Aceh Selatan sebagai salah satu destinasi unggulan yang berada di Provinsi Aceh dengan potensi budaya yang unik dan alam yang indah

telah menjadi daya tarik. Untuk meningkatkan kualitas pariwisata, tentu banyak langkah yang digunakan oleh pihak-pihak yang berperan untuk mengelola. Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan terus mengembangkan pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan ini, melalui program pengembangan pariwisata.

Untuk mewujudkan pelaksanaan yang maksimal, tidak hanya membutuhkan dana yang banyak tetapi juga komitmen dan target apa yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan harus jelas agar program tidak jalan begitu saja, tetapi jelas apa yang ingin dicapai. Komitmen sebagai acuan untuk mengejar target agar apa yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. Untuk mengetahui tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin dicapai melalui program ini, hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pariwisata menyebutkan bahwa:

“Tentunya ada tujuan yang ingin dicapai, yang menjadi tujuan khusus kita tentunya menjadikan Aceh Selatan sebagai icon kepariwisataan daerah maupun nasional. Sedangkan tujuan umum yang ingin kita capai adalah mempromosikan dan mendatangkan pengunjung wisatawan ke Aceh Selatan. Namun tentunya harus didukung dengan fasilitas yang memadai, infrastruktur jalan yang bagus dan lain sebagainya. Itu semua harus diperhatikan dan diperbaiki.”⁶²

Lanjut Kepala Dinas Pariwisata juga menyebutkan bahwa:

“Seperti yang kita ketahui bersama bahwa memang Aceh Selatan ini sejak dulu sudah terkenal dengan potensi lingkungan alami yang ada. Keadaan geografis, pemandangan alam dan budaya yang unik sangat mendukung dan menjadi peluang untuk pengembangan pariwisata sehingga melalui kepariwisataan yang terus akan kita kembangkan ini bisa mensejahterakan masyarakat dan menciptakan pariwisata yang kearifan lokal secara islami.”⁶³

⁶²Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 24 Januari 2023

⁶³Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 24 Januari 2023

3) Jumlah Kunjungan Wisatawan

Tabel 4.6

Jumlah Kunjungan Wisatawan pada Objek Wisata Tapak Tuan Tapa

No	Tahun	Jumlah Kunjungan Wisata	
		Nusantara	Mancanegara
1.	2020	29.782 Orang	-
2.	2021	29.282 Orang	-
3.	2022	24.393 Orang	-
Total		83.457 Orang	-

Sumber: Data Sekunder Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan tabel ini terhadap jumlah kunjungan wisatawan pada objek wisata Tapak Tuan Tapa di Kabupaten Aceh Selatan menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisata 29.782 orang dari wisata nusantara sedangkan dari mancanegara tidak melakukan kunjungan wisata ke Tapak Tuan Tapa di satu sisi karena masih melonjaknya covid-19 di dunia dan Indonesia sedangkan di sisi lain kurang menjaminkannya ketentraman, ketertiban dan perjalanan jarak jauh baik dari negaranya sendiri maupun negara tujuannya. Dalam perkembangan di tahun 2021 jumlah kunjungan wisata 29.282 orang dari wisata nusantara sedangkan dari mancanegara tidak melakukan kunjungan wisata ke Tapak Tuan Tapa dikarenakan terjadinya kerusakan pada prasarana jembatan layang pada objek wisata Tapak Tuan Tapa. Dan pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisata 24.393 orang dari wisata nusantara sedangkan dari mancanegara tidak melakukan kunjungan wisata ke Tapak Tuan Tapa yang disebabkan belum pembenahan atau merenovasi prasarana jembatan layang pada objek wisata Tapak Tuan Tapa.

Dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan sektor yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian. Hal ini untuk dapat menjadikan sektor ini berhasil, maka diperlukan kinerja yang sesuai dengan keahlian dalam mengelola aset pariwisata yang ada, kekayaan alam dan budaya. Keberhasilan suatu kebijakan atau program kepariwisataan ini tidak hanya menjadikan target utama agar dapat menarik pengunjung wisata untuk datang, tetapi juga dapat mengembangkan peluang usaha-usaha masyarakat di dalamnya supaya agar dapat berkembang maju yang bertujuan untuk meningkatkan PAD dan menarik pengunjung asing untuk datang.

C. Dampak (*Impact*)

Pariwisata adalah perjalanan menuju daerah yang memiliki potensi alam dan terasosiasi dengan sosial kultur masyarakat di suatu daerah. Wisatawan dapat menikmati keindahan alam, juga menikmati keindahan budaya lokal yang ada. Keindahan alam dan budaya yang ditawarkan juga menimbulkan dampak kepada lingkungan, baik dampak ekonomi, sosial, budaya atau fisik, baik dampak positif ataupun negatif. Pengembangan pariwisata di suatu daerah tujuan wisata harus didasarkan pada perencanaan, pengembangan dan arah pengelolaan yang jelas agar semua potensi yang dimiliki dapat diberdayakan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut juga sesuai dengan pasal 69 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Masyarakat, tokoh adat, dan ulama memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan Aceh yang berupa pemberian saran,

pertimbangan, pendapat, tanggapan, masukan terhadap pengembangan kepariwisataan dan berperan aktif dalam pengelolaan objek wisata serta pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan Aceh.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di sekitar objek wisata Tapak Tuan Tapa menyebutkan bahwa:

“Mengenai tingkat kunjungan wisata sejauh ini lumayan karena pengunjung disini tidak tetap. Saya selaku pedagang disini dalam sehari dapat pendapatan uang kisaran dua ratus ribu perharinya. Jika pengunjungnya meningkat bisa mencapai dua juta pada hari libur seperti libur lebaran.”⁶⁵

Adapun hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di sekitar objek wisata Tapak Tuan Tapa juga menyebutkan bahwa:

“Pendapatan disini bergantung pada tingkatnya pengunjung baik dari masyarakat lokal maupun pendatang dari luar Aceh. Kadang-kadang saya sebagai penjual makanan dapat pendapatan uang kisaran lima ratus ribu perharinya. Jika pengunjungnya ramai bisa mencapai empat juta dalam seharinya.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, pendapatan perekonomian masyarakat di sekitar objek wisata Tapak Tuan Tapa berdampak negatif. Pengembangan objek wisata dapat mempengaruhi perekonomian bagi komunitas tuan rumah dan dapat menaikkan taraf hidup melalui pendapatan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut.

Bila dilakukan dengan benar dan tepat maka pariwisata dapat meminimalkan permasalahan. Penduduk setempat mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pengembangan objek wisata, karena penduduk

⁶⁴Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata, Hlm. 20

⁶⁵Wawancara dengan Masyarakat di sekitar objek wisata Tapak Tuan Tapa 1 pada tanggal 26 Januari 2023

⁶⁶Wawancara dengan Masyarakat di sekitar objek wisata Tapak Tuan Tapa 2 pada tanggal 26 Januari 2023

setempat mau tidak mau terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kepariwisataan di daerah tersebut, misalnya bertindak sebagai tuan rumah yang ramah, penyelenggara atraksi wisata dan budaya khusus (tarian adat, upacara-upacara agama, ritual, dan lain-lain), produsen cinderamata yang memiliki kekhasan dari objek tersebut dan turut menjaga keamanan lingkungan sekitar sehingga membuat wisatawan yakin, tenang, aman selama mereka berada di objek wisata tersebut.

4.2.2. Tantangan Dalam Pengembangan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa

Periode 2020-2022

1. Kapasitas Pariwisata

A. Anggaran Pengembangan Objek Wisata

Anggaran berbasis pariwisata merupakan salah satu instrumen dalam upaya pengembangan pariwisata dalam rangka mengoptimalkan revitalisasi pembangunan sarana dan prasarana destinasi wisata yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan perekonomian masyarakat, untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat serta menjaga atau mengelola aset kelestarian alam. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk pemerintah dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Daerah yang memadai untuk pemerintah daerah. Secara umum ada tiga sumber pendapatan anggaran pemerintah Aceh, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana OTSUS, dan dana perimbangan (dana DAK Fisik).

Pada tahun 2021 Bappeda Kabupaten Aceh Selatan sudah merencanakan adanya dokumen pembangunan untuk perencanaan pembangunan objek wisata Tapak tetapi dari Dinas Pariwisata tidak dilaksanakan atau dianggarkan untuk mendukung pelaksanaan dana otsus untuk revitalisasi pembangunan objek wisata Tapak tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bappeda menyebutkan bahwa:

“Pada tahun 2022 kami sudah menganggarkan dana untuk revitalisasi pembangunan objek wisata Tapak melalui dana Otsus sebesar 1 miliar untuk fisiknya sebesar 950 juta, tetapi pihak dinas pariwisata tidak jadi dilakukan karena masih tersandung masalah hukum. Program-program yang direncanakan oleh dinas pariwisata itu pada tahun 2024 mendatang, kami pihak bappeda akan berusaha dengan sumber dana yang lain dikarenakan otsus pernah gagal pada tahun 2022 dan pada tahun sebelumnya masih bermasalah pada kasus hukum. Di tahun 2023 ini mereka sudah dilakukan adanya penghapusan aset oleh pemerintah daerah kabupaten Aceh Selatan, barulah nanti kita bisa membangun lagi makanya direncanakan pembangunan nanti di tahun 2024. Kita usulkan atau rencanakan pakai dana APBN dana alokasi khusus fisik tetapi jika itu keluar nantinya.”⁶⁷

Minimnya anggaran untuk pengembangan objek wisata Tapak Tuan Tapa terjadi dikarenakan Dinas Pariwisata pernah mengalami adanya masalah hukum dan anggaran tersebut gagal mendapatkan sebesar Rp. 1 milyar. Program-program tersebut direncanakan oleh Dinas Pariwisata akan berkembang pada tahun 2024 mendatang.

⁶⁷Wawancara dengan Kepala Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 25 Januari 2023

Tabel 4.7
Anggaran Pengembangan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa

No	Tahun	Target	Realisasi	Ket
1.	2020	Rp. 1.000.000.000	Rp. 0	Gagal
2.	2021	Rp. 30.000.000	Rp. 0	Gagal
3.	2022	Rp. 950.000.000	Rp. 35.000.000	Setor ke kas daerah
Total		Rp. 1.980.000.000	Rp. 35.000.000	

Sumber: Data diolah dari data sekunder Dinas pariwisata Kabupaten Aceh Selatan

Adapun hasil wawancara peneliti terkait dengan anggaran yang disampaikan oleh Staf Pemasaran Dinas Pariwisata menyebutkan bahwa:

“Untuk meningkatkan objek wisata Tapak Tuan Tapa itu dikembangkan dalam bentuk ditata kembali di area sekitar objek wisata tersebut sebanyak anggaran 30 juta. Jika program itu kedepannya berjalan sampai 200 juta, kantor-kantor disekitaran wisata akan digusur untuk dipergunakan membangun cafe-cafe sebanyak 5 kios. Dengan keadaan seperti ini, untuk sementara waktu program itu belum terealisasi dikarenakan ada permasalahan perebutan tanah kepemilikan di lokasi objek wisata Tapak.”⁶⁸

Berdasarkan pada hasil wawancara diatas program untuk revitalisasi pembangunan objek wisata Tapak Tuan Tapa yang direncanakan Dinas Pariwisata tidak berjalan dengan maksimal dikarenakan keterbatasan anggaran, realisasi anggaran terlihat sangat minim. Hal ini disebabkan adanya masalah hukum dan perebutan tanah kepemilikan di lokasi objek wisata Tapak Tuan Tapa dikarenakan pengelola bersifat individual. Pada tahun 2023 Dinas Pariwisata sudah dilakukan adanya penghapusan aset-aset pada objek wisata Tapak yang bekerja sama dengan pengelola setempat. Dengan adanya penghapusan aset ini pengelola memperbaiki item-item yang masih layak

⁶⁸Wawancara dengan Staf Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan pada Tanggal 26 Januari 2023

dipergunakan agar kunjungan wisatawan terus meningkat dan pendapatan asli daerah yang diperoleh dari retribusi parkir.

Untuk meningkatkan perekonomian daerah setempat maka pemerintah kabupaten Aceh Selatan berupaya untuk mempromosikan destinasi wisata Tapak Tuan Tapa yang dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dengan adanya duta wisata yang diperkenalkan dan di promosikan ke media sosial. Hal ini dapat menjadi tantangan agar bisa menjadi nilai capaian yang dikembangkan oleh pemerintah melalui berjalannya program-program yang dilaksanakan.

B. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana menjadi faktor pendukung yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata tidak dapat berjalan secara maksimal tanpa adanya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana dalam pengembangan pariwisata pada umumnya berupa travel agent, tour operator, angkutan wisata, rumah makan, akomodasi (hotel/penginapan), jalan, listrik, air, telekomunikasi, jembatan, dan lain sebagainya. Namun saat ini pengembangan pariwisata (termasuk objek wisata) belum dapat berjalan secara maksimal dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana yang harus di emban oleh pemerintah. Prasarana yang belum memadai dalam pengembangan pariwisata khususnya dalam hal pembenahan bangunan jembatan layang pada objek wisata tapak tuan tapa.

Hal ini merujuk pada sumber dari media Realitas online menyebutkan bahwa prasarana jalan layang objek wisata Tapak Tuan Tapa sangat memprihatinkan dikarenakan lantai jembatan dan pagarnya sudah mulai labuk,

tiang penyangga sudah mulai digerus gelombang pasang laut. Kononnya jalan layang menuju lokasi objek wisata tersebut sudah lama rusak, tetapi hingga awal tahun 2022 belum ada perbaikan atau pembenahan. Kunjungan destinasi wisata tersebut setiap hari banyak didatangi oleh wisatawan luar daerah, namun akibat rusaknya jalan tersebut banyak pengunjung kecewa dan merasa waspada atau berhati-hati melaluinya. Oleh karena itu masyarakat berharap kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk dapat kembali memperbaiki jalan layang objek wisata tersebut.⁶⁹

Pembangunan sarana dan prasarana objek wisata berupaya untuk menindak lanjuti dan dilengkapi untuk memantapkan daerah tujuan wisata, sebagai usaha pengembangan daerah tujuan wisata diawali dengan kondisi jalan menuju objek wisata dan pembangunan lainnya.

Tabel 4.8
Sarana dan Prasarana di lokasi objek wisata

No	Lokasi Wisata	Parkir	Mandi Cuci Kakus (MCK)	Mushala	Kantin	Gazebo	Sarana Lain
1.	Tapak Tuan Tapa	✓	-	-	✓	✓	✓
2.	Gunung Lampu	✓	-	-	✓	-	✓
3.	Kolam Renang Aroya	✓	✓	✓	✓	-	-
4.	Ie Sujuk Panjupian	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Panorama Hatta	✓	✓	✓	✓	-	✓
6.	Bukit Gemilang	✓	✓	✓	-	-	✓

Sumber: Data diolah dari data sekunder Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022

⁶⁹Realitas Online. Jalan Layang Objek Wisata “Tapaktuan Tapa” Aceh Selatan Memprihatinkan. [realitasonline.id. https://realitasonline.id/aceh/jalan-layang-objek-wisata-tapaktuan-tapa-aceh-selatan-memprihatinkan-2/](https://realitasonline.id/aceh/jalan-layang-objek-wisata-tapaktuan-tapa-aceh-selatan-memprihatinkan-2/). Tapaktuan. di akses pada 24 November 2022

Berdasarkan dari keseluruhan kegiatan di atas dalam rangka merealisasikan program yang telah di upayakan terkait dengan pihak yang bersangkutan, seperti pembangunan sarana dan prasarana. Tentunya dengan melihat kondisi yang ada dan keadaan yang diinginkan telah diupayakan melalui penetapan sasaran dan kebijakan, tetapi pada fakta dilapangan bahwa ada beberapa fasilitas pada objek wisata yang belum maksimal ataupun tidak mampu dilakukan secara baik dan konsisten.

Berdasarkan pada data di atas, objek wisata Tapak Tuan Tapa belum maksimal dalam menyediakan fasilitas umum seperti penyediaan air, mushala dan sebagainya. Hasil wawancara peneliti yang terkait dengan fasilitas, pengelola objek wisata Tapak Tuan Tapa menyebutkan bahwa:

“Setiap aset daerah sini seperti mushala, listrik, wc serta kebersihan lingkungan di Tapak ini semua tanggung jawab kepada si pengelola. Jadi permasalahan saat ini, memang di tempat ini masih kurang penyediaan air seperti tempat air wudhu. Kadang-kadang air disini mati. Dan pada tahun ini ada rencana untuk membangun mushala supaya pengunjung tidak mencari tempat yang lokasi mushala dari sini jauh, maka dalam tahap ini ada membangun mushala dan memperbaiki air pada tahun ini.”⁷⁰

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan kondisi bangunan jembatan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan jembatan tersebut belum sepenuhnya diperbaiki atau sementara ini adanya penghapusan aset-aset yang ada di lokasi objek tersebut.

Hasil wawancara peneliti dilapangan dengan pengunjung wisata menyebutkan bahwa:

⁷⁰Wawancara dengan Pengelola Objek Wisata Tapak Tuan Tapa pada Tanggal 26 Januari 2023

“Dalam perkembangan pariwisata Aceh Selatan saat ini semakin meningkat. Kita bisa melihat langsung panorama laut dan sejarah dari legenda Tapak Tuan Tapa ini, tetapi dari segi pembangunan jembatan layang ini sebaiknya diperbaiki dengan layak. Kadang-kadang kami kesusahan untuk melewati jalan untuk melihat jejak kaki Tuan Tapa. Namun dari pemkab juga sudah membangun anjungan, jadi kita bisa melihatnya dari atas gunung.”⁷¹

Adapun hasil wawancara peneliti dengan pengunjung wisatawan menyebutkan bahwa:

“Pada bangunan jembatan layang ini sebagian sudah diperbaiki tetapi saya berharap agar pemerintah untuk segera membenahi dengan baik lagi. Karena rencana pembangunan ini sudah lama direncanakan tetapi belum sepenuhnya berhasil. Objek wisata ini salah satu icon yang sudah terkenal di khalayak umum, jadi pemerintah seharusnya memfokuskan pada kegiatan ini.”⁷²

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan pengunjung, mereka berharap perkembangan tersebut terus berlanjut dengan membenahi pembangunan untuk melengkapi fasilitas sarana dan prasarana jembatan layang objek wisata Tapak. Dan pemerintah menyegerakan proses untuk menindaklanjuti pembangunan dengan penghapusan aset-aset dari objek wisata tersebut. Dinas Pariwisata berkontribusi dengan pengelola agar permasalahan ini tidak terjadi di kalangan masyarakat dalam maupun luar.

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2020-2022, menyebutkan adanya permasalahan dan solusi pemecahannya yaitu:

⁷¹Wawancara dengan Pengunjung objek wisata Tapak 1 pada tanggal 26 Januari 2023

⁷²Wawancara dengan Pengunjung objek wisata Tapak 2 pada tanggal 26 Januari 2023

Tabel 4.9
Permasalahan dan Solusi dari Pelaksanaan Kegiatan Selama
Tahun 2020-2022

Tahun	Permasalahan/Kendala	Solusi/Strategis
2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya dan belum meratanya pembangunan kepariwisataan dalam daerah Aceh Selatan sehingga banyak objek-objek wisata daerah yang belum terekplor dengan maksimal dan aksesilitas yang masih sangat terbatas. 2. Terbatasnya anggaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam Dinas Pariwisata, sehingga semua rencana Pembangunan belum dapat dilaksanakan. 3. Kurangnya tenaga sumber daya manusia di bidang kepariwisataan 4. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan 5. Penggunaan media promosi belum maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu adanya pemanfaatan media promosi dalam memperkenalkan objek-objek wisata yang belum diketahui masyarakat secara luas. 2. Perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memprioritaskan pembangunan sarana transportasi ke kawasan objek wisata 3. Diharapkan kepada pemerintah daerah agar memprioritaskan program kepariwisataan dan didukung dengan anggaran yang maksimal 4. Perlu menambah kemampuan tenaga teknis yang menguasai Informasi Teknologi (IT). 5. Diperlukan upaya serius dari Dinas Pariwisata dalam melakukan inovasi dan berkreasi guna dapat mengembangkan promosi yang intens dan beragam. 6. Perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat terhadap arti pentingnya kunjungan wisatawan ke wilayahnya dan memberikan pemahaman serta kesadaran kepada masyarakat untuk ikut merasa memiliki (<i>Sense Of Belonging</i>) bahwa peran masyarakat memiliki fungsi penting dalam memajukan sektor kepariwisataan

Tabel 4.8 - Lanjutan

2021 dan 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerjasama lintas program dan lintas sektoral dengan instansi terkait belum maksimal 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana 3. Masih kurangnya kualitas SDM yang dimiliki dinas terkait yang berhubungan dengan kepariwisataan 4. Masih kurang akuratnya data yang diterima mengenai jumlah yang pasti dari kunjungan wisatawan yang datang baik itu dari dalam maupun luar daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan perekonomian daerah yang dapat memberikan prioritas pembangunan kepariwisataan daerah sehingga tujuan dan rencana program pembangunan dapat dilaksanakan dengan maksimal 2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kepariwisataan 3. Terhadap program yang tidak tertampung di dalam APBK diupayakan dapat ditampung melalui Dana Otsus, APBA dan APBN.
---------------------	--	--

Sumber: Data diolah dari dokumen sekunder Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan

Berdasarkan pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan memiliki beberapa permasalahan yang harus diatasi oleh pemerintah. Salah satunya pada pengembangan objek wisata yang dapat meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah. Dalam mengembangkan suatu objek wisata tentu memerlukan peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana yang menjadi faktor pendukung. Dalam penelitian ini, peneliti mengharapkan pemerintah dapat menyegerakan untuk dibenah/diperbaiki pembangunan prasarana objek wisata yang ada di Kabupaten Aceh Selatan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya

1. Upaya pengembangan objek wisata Tapak Tuan Tapa oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dapat dilihat dalam hal sebagai berikut:
 - a. Adanya penglihatan seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata serta melakukan pelatihan-pelatihan yang terkait dalam bentuk kegiatan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)
 - b. Pengalokasian anggaran untuk pengembangan objek wisata Tapak Tuan Tapa, sejak tiga tahun terakhir pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah menargetkan anggaran agar meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana pengembangan objek wisata untuk meningkatkan perekonomian daerah
 - c. Melakukan promosi destinasi wisata, pemerintah kabupaten Aceh Selatan berupaya strategi dalam mengembangkan wisata melalui *city branding*.
 - d. Adapun terkait tingkat kunjungan wisatawan pada objek wisata Tapak Tuan Tapa mengalami penurunan disebabkan oleh prasarana jembatan layang objek wisata Tapak Tuan Tapa sangat memprihatinkan. Dengan hal ini pemerintah menyegerakan proses pembenahan pada

pembangunan prasarana objek wisata Tapak Tuan Tapa sehingga dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah.

e. Dampak pengembangan objek wisata tersebut relatif kecil sumbangannya bagi perekonomian Aceh Selatan, namun di tingkat rumah tangga adanya tambahan pendapatan dari kunjungan wisatawan terhadap warga sekitar. Akan tetapi sumbangan pendapatan tersebut belum dapat diukur.

2. Pengembangan objek wisata belum berjalan secara optimal karena memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah maupun *stakeholder* terkait tantangan tersebut berupa keterbatasan anggaran, dan keterbatasan sarana dan prasarana pada objek wisata Tapak Tuan Tapa.

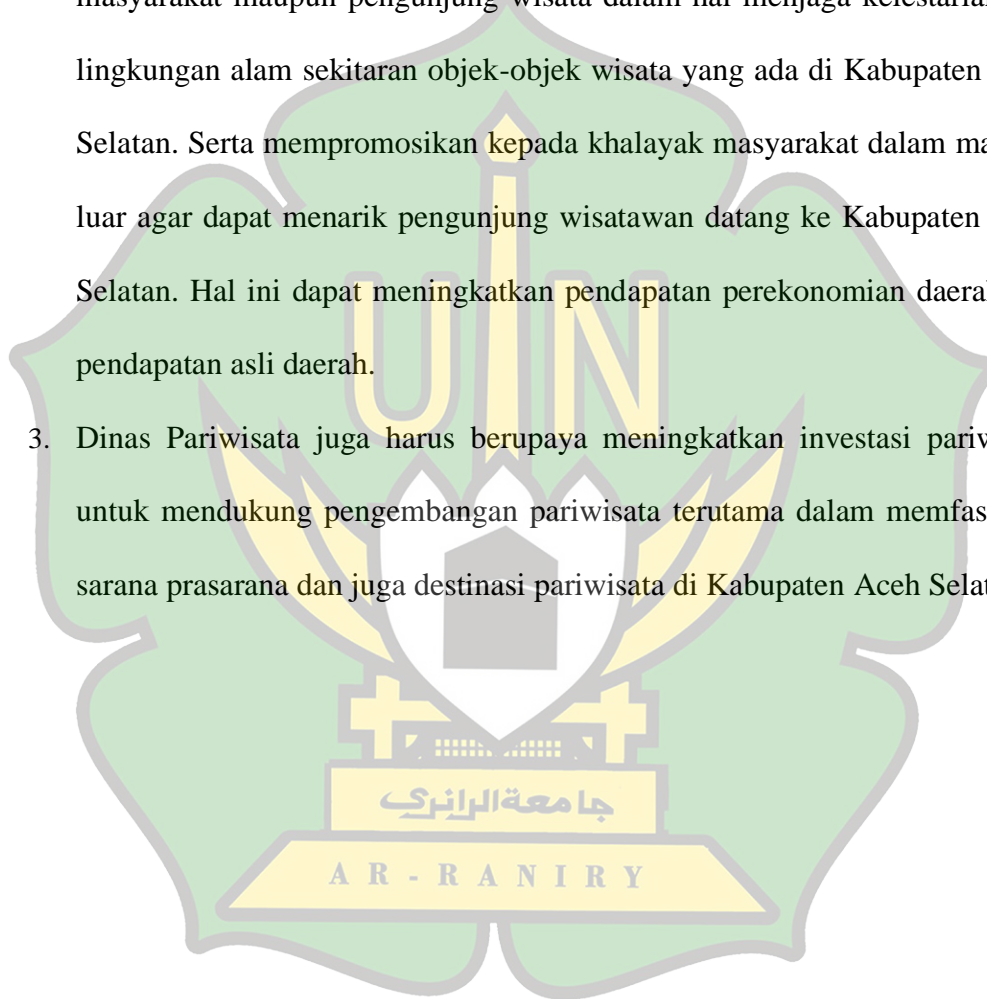
5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah maupun *stakeholder* yang terlibat agar terus berupaya untuk meningkatkan pengembangan destinasi wisata dengan menyusun strategi kegiatan perencanaan dengan kegiatan revitalisasi dan mengoptimalkan objek destinasi tujuan wisata agar tercapainya perekonomian meningkat dengan menerapkan adanya sumber daya manusia, promosi destinasi wisata, adanya infrastruktur, adanya pendapatan asli daerah agar terciptanya pengembangan objek wisata yang baik. Peneliti juga berharap agar pemerintah maupun *stakeholder* seperti Dinas Pariwisata yang memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian dan aset-aset pada objek wisata

dapat bekerja dengan baik, serta pemerintah menyegerakan proses pembenahan atau memperbaiki fasilitas prasarana pendukung dalam mengembangkan objek wisata.

2. Dinas Pariwisata harus terus berupaya untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat maupun pengunjung wisata dalam hal menjaga kelestarian dan lingkungan alam sekitaran objek-objek wisata yang ada di Kabupaten Aceh Selatan. Serta mempromosikan kepada khalayak masyarakat dalam maupun luar agar dapat menarik pengunjung wisatawan datang ke Kabupaten Aceh Selatan. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan perekonomian daerah dan pendapatan asli daerah.
3. Dinas Pariwisata juga harus berupaya meningkatkan investasi pariwisata untuk mendukung pengembangan pariwisata terutama dalam memfasilitasi sarana prasarana dan juga destinasi pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan.



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Rujukan Jurnal

- Maulida, S. (2022). Peran Dinas Pariwisata Dalam Meningkatkan City Branding Pada Promosi Wisata Kabupaten Aceh Selatan. *Vol. 1, No. 3*, 48.
- Pajriah, S. (2018). Peran Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Di Kabupaten Ciamis. *Vol. 5, No. 1*, 29.
- Permatasari, I. A. (2020, Maret 1). Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan). *Social and Government*, Vol. 1, No. 1, 36-37.
- Prasetyo, P. (2013). Strategi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dalam Pengembangan Potensi Objek Wisata Kota Tarakan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1, No. 1, 156.
- Pratama, E. (2019). Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia. *Vol. 2, No. 1*, 77.
- Safriansyah, R. (2021). Sub-National Innovation Policy : A Universal Entitlement To Education Grant In Sabang, Indonesia. *Vol. 7 No. 1*, 29-30.
- Widyastuti, A. R. (2010). Pengembangan Pariwisata Yang Berorientasi Pada Pelestarian Fungsi Lingkungan. *Vol. II, No. 3*, 80-81.

Daftar Rujukan Buku

- Anggito, A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi, Indonesia: CV. Jejak .
- Ardial. (2014). *Paradigma dan Model Penelitian Komunikasi*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara.
- Hardani. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Indonesia: CV. Pustaka Ilmu Grup.
- Hayat. (2019). *Buku Kebijakan Publik*. Malang, Indonesia: Universitas Islam Malang.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, Indonesia: PT. Remaja Rosdakarya.

Pasolong, H. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung, Indonesia: Penerbit Alfabeta.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya, Indonesia: Brilliant.

Wekke, I. S. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta, Indonesia: CV. Adi Karya Mandiri.

Daftar Rujukan Peraturan Perundang-Undangan

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Kepariwisata

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Daftar Rujukan Skripsi/Tesis

Dinata, A. (2016). Preferensi Tempat Bersantai Dan Rekreasi Bagi Masyarakat Kota Pekanbaru Indonesia. 50.

Iqtyar, O. (2020). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang Tentang Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang.

Kadarwati, A. (2008). Potensi Dan Pengembangan Objek Wisata Kota Lama Semarang Sebagai Daya Tarik Wisata Di Semarang. 20.

Karlina, A. (2019). Strategi Pengembangan Potensi Wisata Alam Di Kabupaten Aceh Jaya. 1.

Paskarina, C. (2007). Studi Evaluasi Kebijakan Pengembangan Kabupaten Garut Bagian Selatan. 7-10.

Sun, J. (2016). Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Kepariwisata Festival Tahunan Cap Go Meh Sebagai Upaya Pariwisata Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Jo, Pasal 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Di Kota Singkawang. 3.

Surokim. (2016). Riset Komunikasi Strategi Praktis Bagi Peneliti Pemula. 129.

Sutiarso, M. A. (2017). Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Ekowisata. 2.

Tivani, I. (2016). Evaluasi Program Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Tana Toraja. 32.

Yakup, A. P. (2019). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. 1.

Daftar Rujukan Website dan Internet

(n.d.). Retrieved from [http : //epirints.polsri.ac.id/4972/3/BAB%20II.pdf](http://epirints.polsri.ac.id/4972/3/BAB%20II.pdf)

Abdhul, Y. (n.d.). *Kerangka Pemikiran : Contoh dan Cara Membuat*. Retrieved Desember 23, 2022, from Deepublish: <https://deepublishstore.com/kerangka-pemikiran/>

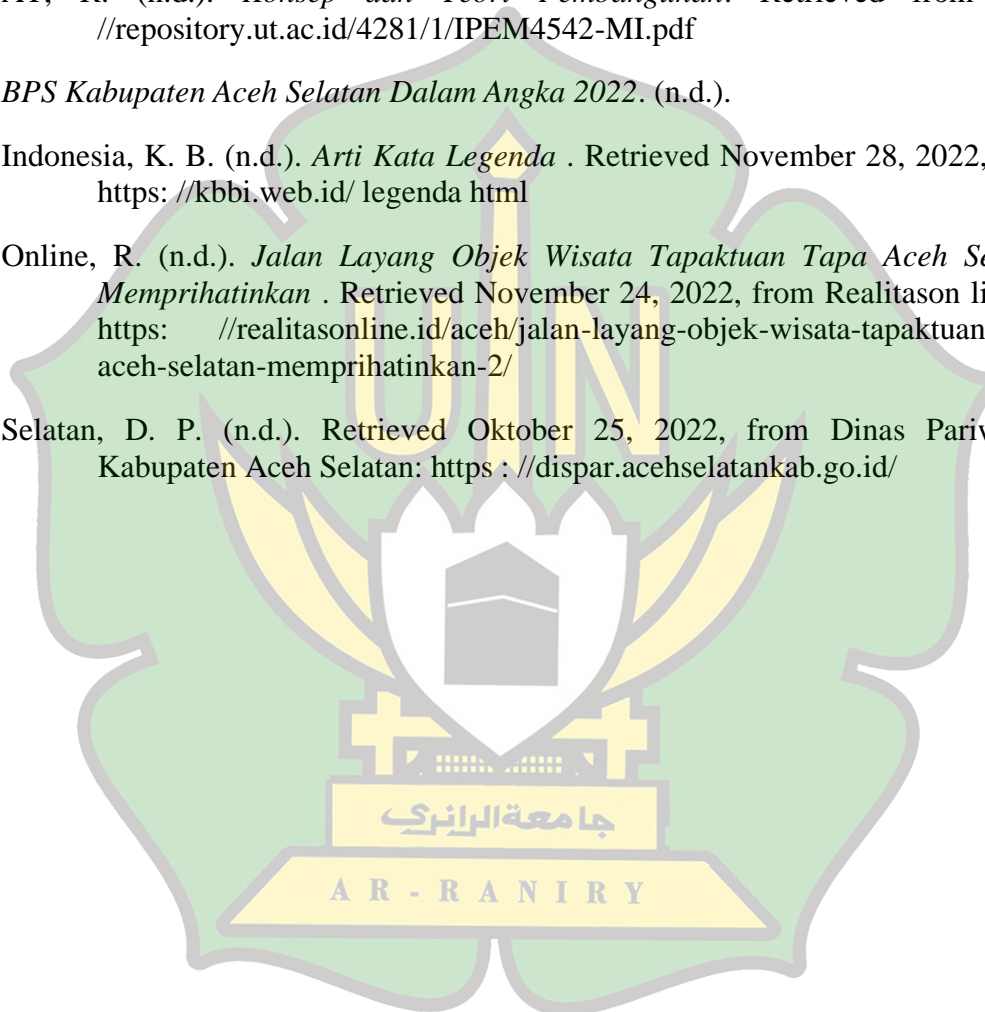
AT, R. (n.d.). *Konsep dan Teori Pembangunan*. Retrieved from <http://repository.ut.ac.id/4281/1/IPEM4542-MI.pdf>

BPS Kabupaten Aceh Selatan Dalam Angka 2022. (n.d.).

Indonesia, K. B. (n.d.). *Arti Kata Legenda* . Retrieved November 28, 2022, from <https://kbbi.web.id/legenda.html>

Online, R. (n.d.). *Jalan Layang Objek Wisata Tapaktuan Tapa Aceh Selatan Memprihatinkan* . Retrieved November 24, 2022, from Realitason line.id: <https://realitasonline.id/aceh/jalan-layang-objek-wisata-tapaktuan-tapa-aceh-selatan-memprihatinkan-2/>

Selatan, D. P. (n.d.). Retrieved Oktober 25, 2022, from Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan: <https://dispar.acehselatankab.go.id/>



LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Pedoman Wawancara Penelitian

1. Apa saja yang telah dilaksanakan oleh PemKab Aceh Selatan dalam rangka pengembangan objek wisata di Kabupaten Aceh Selatan selama tahun 2020-2022?
2. Bagaimana capaian kegiatan tersebut?
3. Sejauh mana upaya ini dilakukan selama tahun 2020-2022?
4. Sejauh mana peran dispar Kab. Aceh Selatan dalam mengembangkan objek wisata Tapak Tuan Tapa?
5. SKPD mana saja yang terlibat langsung dan tidak langsung dalam pengembangan objek wisata Tapak Tuan Tapa?
6. Apakah ada kegiatan renovasi, rehabilitasi dalam pengembangan objek wisata Tapak Tuan Tapa?
7. Bagaimana strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Aceh Selatan?
8. Apakah pengembangan objek wisata telah berdampak pada perekonomian daerah?
9. Apa saja faktor yang dapat mendukung pengembangan objek wisata?
10. Apa saja faktor yang dapat menghambat pengembangan objek wisata?
11. Apakah PemKab Aceh Selatan melakukan pengawasan rutin terhadap objek wisata Tapak Tuan Tapa?
12. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengembangkan objek wisata Tapak Tuan Tapa?

13. Apakah pendapatan meningkat dari tahun 2020-2022 selama berangsur di lokasi objek wisata Tapak Tuan Tapa?
14. Apakah jumlah pengunjung di lokasi objek wisata Tapak Tuan Tapa meningkat dalam beberapa tahun terakhir?
15. Bagaimana kenyamanan objek wisata Tapak Tuan Tapa dari aspek keamanan, fasilitas sarana dan prasarana, kebersihan, tempat parkir, tarif retribusi dan lingkungan?



Lampiran 2 Daftar Objek Wisata Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022

No	Nama Objek	Jenis Objek	Lokasi		Pemilik
			Gampong	Kecamatan	
1.	Sungai Krueng Baru	Alam	Ds. Kuta Trieng	Labuhanhaji Barat	Masyarakat
2.	Kuburan Syahid	Minat Khusus	Ds. Kuta Trieng	Labuhanhaji Barat	Masyarakat
3.	Makam Syech Muda Waly	Minat Khusus	Ds. Blang Poroh	Labuhanhaji Barat	Masyarakat
4.	Goa Batee Meucanang	Minat Khusus	Ds. Peulokan	Labuhanhaji Barat	Masyarakat
5.	Suluk Pesantren Darussalam	Minat Khusus	Ds. Blang Poroh	Labuhanhaji Barat	Masyarakat
6.	Al-Qur'an Keramat	Minat Khusus	Ds. Kuta Iboh	Labuhanhaji Barat	Masyarakat
7.	Pantai Kuta Iboh	Alam	Ds. Kuta Iboh	Labuhanhaji Barat	Masyarakat
8.	Rumah Raja Peulokan	Budaya	-	Labuhanhaji Barat	Masyarakat
9.	Pantai Ujung	Alam	Ds. Pasar Lama	Labuhanhaji	Masyarakat
10.	Goa Kelongsong	Minat Khusus	Ds. Kamunan Pisang	Labuhanhaji	Masyarakat
11.	Sungai Pagar Gantung	Alam	Ds. Kamunan Pisang	Labuhanhaji	Masyarakat
12.	Al-Qur'an Kampung Dalam	Minat Khusus	Ds. Dalam	Labuhanhaji	Masyarakat
13.	Majelis Tasawuf	Minat Khusus	Ds. Dalam	Labuhanhaji	Masyarakat
14.	Pelabuhan Penyebrangan Antar Pulau	Minat Khusus	Ds. Pasar Lama	Labuhanhaji	Pemda
15.	Pangkalan Pendaratan Ikan	Minat Khusus	Ds. Pasar Lama	Labuhanhaji	Pemda
16.	Pantai Putroe Bate Meutupang	Alam	Ds. Paya Peulumat	Labuhanhaji Timur	Masyarakat
17.	Makam Tuanku	Minat	Ds. Limau	Labuhanhaji	Masyarakat

	Keramat	Khusus	Saring	Timur	
18.	Sungai Batu Berhujan	Alam	Ds. Keumumu Hulu	Labuhanhaji Timur	Masyarakat
19.	Pantai Gosong	Alam	Ds. Biduk Buruk	Labuhanhaji Timur	Masyarakat
20.	Pantai SBB	Alam	-	Labuhanhaji Timur	-
21.	Air Terjun Ceurecue	Alam	Ds. Labuhan Tarok	Meukek	Masyarakat
22.	Pantai Lhok Aman	Alam	Ds. Lhok Aman	Meukek	Masyarakat
23.	Pantai Lhok Bengkuang	Alam	Ds. Blang Kuala	Meukek	Masyarakat
24.	Kuburan Keramat Lhok Aman	Minat Khusus	Ds. Lhok Aman	Meukek	Masyarakat
25.	Sungai Jambo Papeun	Alam	Ds. Jambo Papeun	Meukek	Masyarakat
26.	Majelis Tasawuf	Minat Khusus	Ds. Rot Tengoh	Meukek	Masyarakat
27.	Pangkalan Pendaratan Ikan	Minat Khusus	Ds. Pasie Meukek	Meukek	Pemda
28.	Air Terjun Tuwi Lhok	Alam	Ds. Lhok Pawoh	Sawang	Masyarakat
29.	Sungai Tring Meuduro	Alam	Ds. Trieng Meuduro	Sawang	Masyarakat
30.	Pulau Ujung Seurudong	Alam	Ds. Sawang Ba'u	Sawang	Masyarakat
31.	Pantai Lhok Pawoh	Alam	Ds. Lhok Pawoh	Sawang	Masyarakat
32.	Pertambangan Emas Rakyat	Minat Khusus	Ds. Panton Luas	Sawang	Masyarakat
33.	Pangkalan Pendaratan Ikan	Minat Khusus	Ds. Lhok Pawoh	Sawang	Pemda
34.	Goa Muslimin	Minat Khusus	-	Sawang	Masyarakat
35.	Pantai Batu Berlayar	Alam	Ds. Batee Tunggal	Samadua	Masyarakat
36.	Kolam Setui Indah	Minat	Ds. Batee	Samadua	Masyarakat

		Khusus	Tunggai		
37.	Pantai Pasir Putih	Minat Khusus	Ds. Batee Tunggai	Samadua	Masyarakat
38.	Air Terjun Air Dingin	Minat Khusus	Ds. Batee Tunggai	Samadua	Masyarakat
39.	Sungai Sikabu	Alam	Ds. Gunung Ketek	Samadua	Masyarakat
40.	Pantai Cemara Ujung Tanah	Minat Khusus	Ds. Ujung Tanah	Samadua	Masyarakat
41.	Sungai Lubuk Layu	Alam	Ds. Lubuk Layu	Samadua	Masyarakat
42.	Batu Sumbang	Budaya	Ds. Batee Tunggai	Samadua	Masyarakat
43.	Gunung Lampu	Alam	Ds. Pasar	Tapaktuan	Pemda
44.	Tapak, Tongkat Tuan Tapa	Budaya	Ds. Pasar	Tapaktuan	Pemda
45.	RTH Taman Pala Indah	-	-	Tapaktuan	-
46.	Kolam Renang Aroya	Minat Khusus	Ds. Lhok Bengkuang	Tapaktuan	Masyarakat
47.	Masjid Tuo	Budaya	Ds. Padang	Tapaktuan	Masyarakat
48.	Goa Kalam	Minat Khusus	Ds. Jambo Apha	Tapaktuan	Masyarakat
49.	Tugu Proklamasi	Budaya	Ds. Pasar	Tapaktuan	Pemda
50.	Pangkalan Pendaratan Ikan	Minat Khusus	Ds. Lhok Bengkuang	Tapaktuan	Pemda
51.	Bunker Jepang	Budaya	Ds. Lhok Bengkuang	Tapaktuan	Masyarakat
52.	Tugu PKA - 4	Budaya	Ds. Lhok Bengkuang	Tapaktuan	Masyarakat
53.	Batu Sisik Naga	Budaya	Ds. Lhok Bengkuang	Tapaktuan	Masyarakat
54.	Air Terjun Tingkat Tujuh	Alam	Ds. Batu Itam	Tapaktuan	Masyarakat
55.	Aliran Naga	Budaya	Ds. Batu Itam	Tapaktuan	Masyarakat
56.	Ie Sijuk Panjupian (Arga)	Minat Khusus	Ds. Panjupian	Tapaktuan	Masyarakat
57.	Panorama Hatta	Budaya	Ds. Lhok	Tapaktuan	Pemda

			Rukam		
58.	Pantai Pasir Setumpuk	Alam	Ds. Lhok Rukam	Tapaktuan	Masyarakat
59.	Sungai Air Benting	Alam	Ds. Air Pinang	Tapaktuan	Masyarakat
60.	Bukit Gemilang	Alam	Ds. Lhok Bengkuang	Tapaktuan	Pemda
61.	Bivak Belanda	-	-	Tapaktuan	-
62.	Pantai Cemara Ujung Batu	Alam	Ds. Ujung Batu	Pasie Raja	Masyarakat
63.	Makam Tgk Said Balabareh	Minat Khusus	Ds. Mata Ie	Pasie Raja	Masyarakat
64.	Pantai Pasie Ladang Tuha	Alam	Ds. Ladang Tuha	Pasie Raja	Masyarakat
65.	Gunung Terbang	Budaya	Ds. Ladang Tuha	Pasie Raja	Masyarakat
66.	Sungai Pucok Krueng	Alam	Ds. Pucok Krueng	Pasie Raja	Masyarakat
67.	Bandara T. Cut Ali	Minat Khusus	Ds. Teupin Gajah	Pasie Raja	Pemda
68.	Pantai Lancang Sira	Alam	Ds. Asahan	Pasie Raja	Masyarakat
69.	Pertambangan Emas Rakyat	Minat Khusus	Ds. Paya Teuk	Pasie Raja	Masyarakat
70.	Masjid Tuo Pulo Kambing	Budaya	Ds. Pulo Kambing	Kluet Utara	Masyarakat
71.	Pantai Pasie Kuala Ba'u	Alam	Ds. Kuala Ba'u	Kluet Utara	Masyarakat
72.	Bupaleh (Bentang) Kuala Ba'u	Budaya	Ds. Kuala Ba'u	Kluet Utara	Masyarakat
73.	Rumoh Rayeuk	Budaya	Ds. Kuala Ba'u	Kluet Utara	Masyarakat
74.	Rumah Raja Kejruen Mukmin	Budaya	-	Kluet Utara	Masyarakat
75.	Irigasi Gunong Pudong	Alam	Ds. Kampung Payo	Kluet Utara	Pemda
76.	Makam Abuya Syeh H. Jailani	-	-	Kluet Utara	-

	Musa				
77.	Arung Jeram Jambor Teka Mega	Alam	Ds. Lawe Melang	Kluet Tengah	Masyarakat
78.	Rumah Rungko Adat Kluet	Budaya	Ds. Koto Indarung	Kluet Tengah	Pemda
79.	Sungai Arung Jeram Simpali	Budaya	Ds. Simpali	Kluet Tengah	Masyarakat
80.	Pertambangan Emas Rakyat	Minat Khusus	Ds. Simpang Tiga	Kluet Tengah	Masyarakat
81.	Danau Teluk Belango	Alam	Ds. Malaka	Kluet Tengah	Masyarakat
82.	Makam T. Panglima Raja Lelo	Budaya	Ds. Sapik	Kluet Timur	Masyarakat
83.	Irigasi Paya Dapur	Alam	Ds. Paya Dapur	Kluet Timur	Masyarakat
84.	Tapak Aulia	Budaya	Ds. Kubang Gajah	Kluet Timur	Masyarakat
85.	Pusat Penelitian Orang Hutan	Minat Khusus	Ds. Suak Belimbing	Kluet Timur	Pemda
86.	Hutan Lindung TNGL	Alam	Ds. Rantau Sialang	Kluet Selatan	Pemda
87.	Pantai Cemara Lubuk Sipuru	Budaya	Ds. Lhok Jamin	Kluet Selatan	Masyarakat
88.	Makam T. Cut Ali	Minat Khusus	-	Kluet Selatan	Masyarakat
89.	Kebun Binatang Mini	Minat Khusus	Ds. Suak Bakung	Kluet Selatan	Pemda
90.	Danau Genting Buaya	Alam	Ds. Pasie Lembang	Kluet Selatan	Pemda
91.	Pantai Ujung Karang	Alam	Ds. Lhok Jamin	Bakongan	Masyarakat
92.	Pulau Pasir	Alam	Ds. Lhok Jamin	Bakongan	Masyarakat
93.	Pantai Ujung Kuala	Alam	Kota Bakongan	Bakongan	Masyarakat
94.	Irigasi Beutong	Minat Khusus	-	Kota Bahagia	Masyarakat
95.	Air Terjun Alur	Alam	-	Kota	Masyarakat

	Buloh			Bahagia	
96.	Makam T. Raja Angkasah	Budaya	-	Kota Bahagia	Pemda
89.	Kebun Binatang Mini	Minat Khusus	Ds. Suak Bakung	Kluet Selatan	Pemda
90.	Danau Genting Buaya	Alam	Ds. Pasie Lembang	Kluet Selatan	Pemda
91.	Pantai Ujung Karang	Alam	Ds. Lhok Jamin	Bakongan	Masyarakat
92.	Pulau Pasir	Alam	Ds. Lhok Jamin	Bakongan	Masyarakat
93.	Pantai Ujung Kuala	Alam	Kota Bakongan	Bakongan	Masyarakat
94.	Irigasi Beutong	Minat Khusus	-	Kota Bahagia	Masyarakat
95.	Air Terjun Alur Buloh	Alam	-	Kota Bahagia	Masyarakat
96.	Makam T. Raja Angkasah	Budaya	-	Kota Bahagia	Pemda
89.	Kebun Binatang Mini	Minat Khusus	Ds. Suak Bakung	Kluet Selatan	Pemda
90.	Danau Genting Buaya	Alam	Ds. Pasie Lembang	Kluet Selatan	Pemda
91.	Pantai Ujung Karang	Alam	Ds. Lhok Jamin	Bakongan	Masyarakat
92.	Pulau Pasir	Alam	Ds. Lhok Jamin	Bakongan	Masyarakat
93.	Pantai Ujung Kuala	Alam	Kota Bakongan	Bakongan	Masyarakat
94.	Irigasi Beutong	Minat Khusus	-	Kota Bahagia	Masyarakat
95.	Air Terjun Alur Buloh	Alam	-	Kota Bahagia	Masyarakat
96.	Makam T. Raja Angkasah	Budaya	-	Kota Bahagia	Pemda
97.	Danau Laut Bangko	Minat Khusus	-	Kota Bahagia	Masyarakat
98.	Monumen Kuburan Massal	Budaya	-	Kota Bahagia	Pemda

99.	Jambo Kapuk	-	-	Kota Bahagia	Masyarakat
100.	Pulau Dua	Alam	-	Bakongan Timur	Masyarakat
101.	Pantai Lhok Jamin	Alam	-	Bakongan Timur	Masyarakat
102.	Air Terjun Simpang	Alam	-	Bakongan Timur	Masyarakat
103.	Sungai Seulekat	Minat Khusus	Ds. Seulekat	Bakongan Timur	Masyarakat
104.	Panorama Gunung Kapur	Alam	-	Trumon Tengah	Masyarakat
105.	Gunung Calok Bate	Alam	-	Trumon Tengah	Masyarakat
106.	Air Terjun Senebok Buloh	Alam	-	Trumon Tengah	Masyarakat
107.	Batu Bersurat	Budaya	-	Trumon Tengah	Masyarakat
108.	Air Terjun Simpang II	Alam	-	Trumon Tengah	Masyarakat
109.	Air Terjun Gunung Lamidin CRU Naca	Alam	-	Trumon Tengah	Masyarakat
110.	Air Terjun Tangga Seribu	Alam	-	Trumon Tengah	Masyarakat
111.	Pantai Trumon	Alam	Trumon	Trumon	Masyarakat
112.	Makam Raja Trumon	Budaya	Trumon	Trumon	Masyarakat
113.	Benteng Raja Trumon	Budaya	Trumon	Trumon	Masyarakat
114.	Pulau-Pulau Trumon	Alam	Trumon	Trumon	Masyarakat
115.	Pulau Nibong	Alam	Trumon	Trumon	Masyarakat
116.	Irigasi Jambo Dalem	Minat Khusus	Jambo Dalem	Trumon Timur	Pemda
117.	Gunung Tengku	Alam	-	Trumon Timur	Masyarakat

Lampiran 3 Sarana dan Prasarana di lokasi objek wisata

No	Sarana/Prasarana	Lokasi Pembangunan
1.	Parkir	1. Gunung Lampu 2. Tapak Tuan Tapa 3. Kolam Renang Aroya 4. Ie Sijuk Panjupian 5. Panorama Hatta 6. Bukit Gemilang
2.	Mandi Cuci Kakus (MCK)	1. Kolam Renang Aroya 2. Ie Sijuk Panjupian 3. Panorama Hatta 4. Bukit Gemilang
3.	Mushala	1. Kolam Renang Aroya 2. Ie Sijuk Panjupian 3. Panorama Hatta 4. Bukit Gemilang
4.	Kantin	1. Gunung Lampu 2. Tapak Tuan Tapa 3. Kolam Renang Aroya 4. Ie Sijuk Panjupian 5. Panorama Hatta
5.	Gazebo	1. Tapak Tuan Tapa 2. Ie Sijuk Panjupian
6.	Dll	1. Gunung Lampu 2. Tapak Tuan Tapa 3. Ie Sijuk Panjupian 4. Panorama Hatta 5. Bukit Gemilang

Lampiran 4 Jumlah Kunjungan Wisatawan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa

No	Tahun	Jumlah Kunjungan (Jiwa)
1.	2020	29.782
2.	2021	29.282
3.	2022	24.393

Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian

	<p>PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN</p> <p>DINAS PARIWISATA</p> <p>Jln. T. Ben Mahmud No. 4 – 6 Telp. (0656) 322803/Fax. (0656) 323098</p> <p>TAPAKTUAN Kode Pos 23718</p>	
Tapaktuan, 26 Januari 2023		
Nomor : 556/ 15 /2023	Kepada Yth :	
Lamp :	Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	
Perihal : <u>Surat Keterangan Penelitian</u>	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu	
	Pemerintah	
	Di –	
	<u>Banda Aceh</u>	
Yang bertanda tangan di Bawah Ini :		
Nama :	MUCHSIN, ST	
NIP :	19740710 200604 1 005	
Jabatan :	Plt Kepala Dinas Pariwisata Kab.Aceh Selatan	
Alamat :	Jln.T.Ben Mahmud No 04-06 Tapaktuan	
Dengan ini menerangkan bahwa siswa/(i) yang beridentitas :		
Nama :	INDAH RIZKI AMALIA	
NIM :	180802040	
Alamat :	Lhok Bengkuang Kec. Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan	
Adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka untuk menyusun skripsi dengan metode penelitian berupa wawancara dengan narasumber yang telah ditentukan di Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 26 Januari 2023 dengan judul “Evaluasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa di Kabupaten Aceh Selatan” .		
Demikian Surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.		
		
<p>KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN ACEH SELATAN,</p> <p>MUCHSIN, ST NIP. 19740710 200604 1 005</p>		

Lampiran 6 SK Pembimbing Skripsi

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2725/Un.08/FISIP/Kp.07.6/10/2022

TENTANG

PENGGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 28 September 2022
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
PERTAMA : Menunjuk Saudara
 1. Dr. Ade Irma, B.H.Sc., M.A. Sebagai pembimbing pertama
 2. Renaldi Saffiansyah, S.E., M.HSc. Sebagai pembimbing kedua
 Untuk membimbing skripsi :
 Nama : Indah Rizki Amalia
 NIM : 180802040
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Judul : Evaluasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa di Kabupaten Aceh Selatan
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2023.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : 21 Oktober 2022

an.
 Rektor
 Dekan,

Muji Muja

Tembusan

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara,
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan,
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 7 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-3145/Un.08/FISIP. WD.I/PP.00.9/12/2022
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan
2. Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan
3. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata
4. Kasi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata
5. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bappeda Kabupaten Aceh Selatan
6. Pengelola objek wisata Tapak Tuan Tapa
7. Pengunjung objek wisata
8. Masyarakat di sekitar objek wisata

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **INDAH RIZKI AMALIA / 180802040**
 Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Lhok Bengkuang, Tapaktuan, Aceh Selatan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Evaluasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa Di Kabupaten Aceh Selatan**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

A R - R A

Banda Aceh, 26 Desember 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 27 Juni 2023

Eka Januar, M.Soc.Sc.

Lampiran 8 Foto Dokumentasi

- Kondisi Bangunan Objek Wisata Tapak Tuan Tapa Kabupaten Aceh Selatan









- Wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Selatan



- Wawancara dengan Staf Pemasaran Pariwisata Aceh Selatan



- Wawancara dengan Staf Pemasaran Pariwisata Kab. Aceh Selatan



- Wawancara dengan Staf Pengembangan Destinasi Pariwisata



- Wawancara dengan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan Bappeda Kab. Aceh Selatan



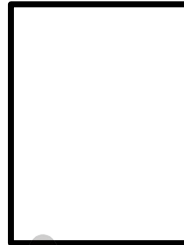
- Wawancara dengan Pengelola Objek Wisata Tapak Tuan Tapa



- Wawancara dengan Masyarakat di sekitar Objek Wisata Tapak Tuan Tapa



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Indah Rizki Amalia
 Tempat Tanggal Lahir : Tapaktuan, 29 Juli 2000
 Nomor Handphone : 085362466524
 Alamat : Lhok Bengkuang, Tapaktuan, Aceh Selatan
 Email : 180802040@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : SD Negeri Jorong Hulu
 Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 1 Tapaktuan
 Sekolah Menengah Atas : SMK Negeri 1 Tapaktuan

Sertifikasi

Ma'had Jamiah	: 76	2020	Ma'had Al-Jami'ah
TOEFL	: 410	2021	Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
TOAFL	A R : 403 A N	2021	Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
Komputer	: B	2022	ICT Center UIN Ar-Raniry
Magang	: 99.57	2021	Dinas Syariat Islam Aceh

Banda Aceh, 14 Februari 2023

Indah Rizki Amalia
 NIM. 180802040

